

Percik

Edisi 2016 - Tahun ke 14

Edisi Bahasa Indonesia



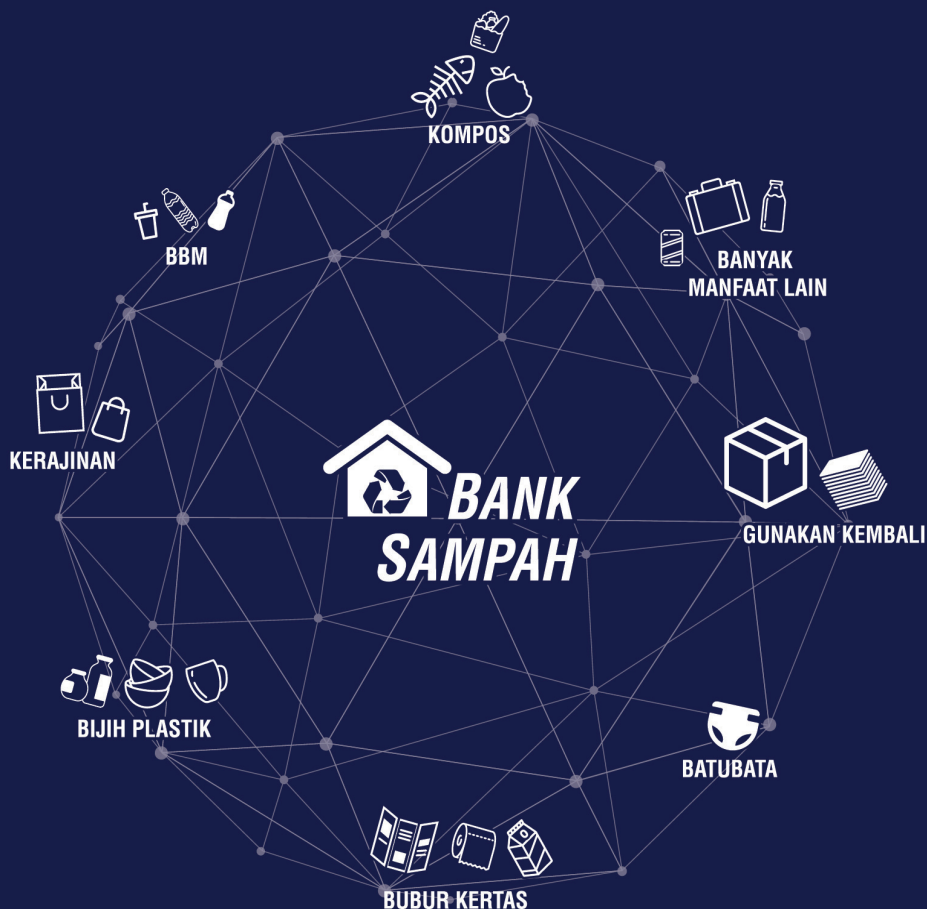
Mengurai Beban Kota Metropolitan

Beban Ibukota
yang Kian Berat.... 8

Melapor Kini Menjadi
Gaya Hidup.... 28

Belum Bebas Buang
Sampah Sembarang.... 31

MENGURAI MASALAH SAMPAH BISA DIMULAI DARI MEMILAH DAN MEMILIH



Kompos

Sampah organik yang dikumpulkan bisa diolah menjadi kompos yang bisa dipakai yang bermanfaat bagi lingkungan

BBM

Berbagai jenis plastik seperti plastik mie instan dan lainnya bisa diolah dengan menggunakan alat khusus untuk dijadikan bahan bakar setara bensin dan solar.

Kerajinan

Barang-barang menarik seperti tas, hiasan dan lainnya pun bisa dihasilkan bank sampah.

Bijih plastik

Ini adalah salah satu cara mengolah plastik. Bijih plastik kemudian dijual ke pabrik untuk diolah kembali menjadi berbagai barang.

Bubur kertas

Kertas yang masih bagus bisa dijual langsung, namun bagi yang kondisinya kurang baik bisa diolah menjadi bubur kertas sebelum akhirnya dijadikan barang lain.

Batu bata

Barang seperti *diapers* dan sejenisnya bisa diolah menjadi batu bata.

Gunakan Kembali

Sampah yang masih bagus kondisinya seperti kertas dan kardus bisa langsung dijual dengan harga yang cukup baik.

Banyak manfaat lain

Masih banyak lagi barang yang bisa dihasilkan dari mengolah sampah. Semakin banyak kreativitas dan teknologi yang dipergunakan, maka makin banyak sampah yang bisa didaur ulang.



Mengurai Beban Kota Metropolitan

Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi membawa konsekuensi pada peningkatan densitas penduduk perkotaan beserta segala kompleksitas kebutuhannya terutama perumahan dan permukiman. Permasalahan menjadi lebih rumit ketika laju pertumbuhan kebutuhan tersebut tidak dapat diiringi dengan peningkatan kapasitas penyediaan perumahan, air minum, air limbah, persampahan dan drainase. Perkembangan perkotaan yang tidak diiringi dengan sistem penyediaan perumahan dan permukiman menyebabkan tumbuhnya perumahan dan permukiman yang tersebar tanpa rencana dan tak terkendali di kawasan-kawasan *hinterland*.

Peningkatan mobilitas harian manusia tanpa didukung sistem transportasi massal yang cepat dan handal menyebabkan inefisiensi waktu dan biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat. Pada sisi lainnya, tumbuhnya kawasan perumahan tak terkendali, tanpa didukung dengan layanan infrastruktur yang memadai berpotensi menyebabkan tumbuhnya permukiman kumuh. Permasalahan kemacetan, banjir permukiman, air limbah

tak terolah dan sampah tak terangkut merupakan fenomena sehari-hari yang semakin sering dijumpai, khususnya di daerah peralihan dimana ciri desa sudah hilang namun sistem pelayanan perkotaan belum memadai. Bila tidak tertangani dengan baik hal ini menjadi tragedi masa depan.



Permasalahan kemacetan, banjir permukiman, air limbah tak terolah dan sampah tak terangkut merupakan fenomena sehari-hari yang semakin sering dijumpai, khususnya di daerah peralihan dimana ciri desa sudah hilang namun sistem pelayanan perkotaan belum memadai.

Pada edisi 2016 ini, Majalah Percik mengangkat tema tentang Metropolitan, yaitu kumpulan beberapa kota yang berpusat pada satu kota inti. Dalam edisi kali ini yang menjadi contoh adalah fenomena Metropolitan Jabodetabek dengan Jakarta sebagai sentralnya. Sementara itu dalam laporan khusus, kami mengangkat isu tentang perilaku warga dalam menangani sampah rumah tangga mereka. Sebagian mereka masih mempunyai perilaku buang sampah sembarangan, sementara yang lain mengandalkan petugas pengangkut sampah. Dua hal ini disajikan dalam berita reportase khas PERCIK. Di rubrik sosok, Majalah PERCIK menulis tentang kiprah almarhum Nugroho Tri Utomo, salah seorang *champion* pembangunan air minum dan sanitasi yang mempunyai peran besar memuluskan jalan pembangunan. Sosok Pak Nug, begitu dia biasa disapa, tidak bisa dipisahkan dengan pembangunan air minum dan sanitasi dalam lebih satu dekade terakhir. Rubrik lainnya juga menarik untuk dibaca. Baik itu wawancara dengan beberapa tokoh, hingga resensi dan kilas berita.

**Selamat Membaca
Nurul Wajah Mujahid**

Lensa



6

Darurat Sampah

Jakarta sudah masuk dalam kategori darurat sampah. Produksi sampah terus meningkat, padahal selama ini penanganannya masih belum banyak mengalami peningkatan.

Laporan Utama



8

Beban Ibukota yang Kian Berat

Berdasarkan di KRL Commuterline atau mengalami macet di jalanan menuju tempat kerja di Jakarta adalah sebuah pemandangan sehari-hari yang sudah biasa dialami oleh pekerja di Ibukota.

Laporan Utama



16

Berpacu dengan Pertumbuhan yang Tidak Pernah Pelan

Setiap tahunnya ada ratusan ribu rumah tangga baru yang bertambah di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi).

Wawancara



21

Pembangunan Harus Integratif dan Perhatikan Aspek Lingkungan

Kepala daerah di kota-kota penyangga Ibukota menyadari bahwa penduduk dan permintaan permukiman di wilayah mereka tumbuh pesat dan berdampak pada masalah lain.

Lifestyle



28

Melapor Kini Menjadi Gaya Hidup

Masalah kota tidak akan pernah terselesaikan jika masyarakat tidak mau ikut terlibat. Setidaknya, mereka bisa berkontribusi dengan cara melapor dan mengawasi laporan sampai tuntas diselesaikan.



**Kelompok Kerja
Air Minum dan
Penyehatan
Lingkungan**

POKJA AMPL

adalah wadah lintas kementerian yang bertugas mengoordinasikan arah dan kebijakan pembangunan air minum dan sanitasi.

Percik

Alamat Redaksi Majalah Percik :

Jl. Lembang No.35, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Telp/Fax : 021-31904113,
Situs Web : <http://www.ampl.or.id>,
Email: pokja@ampl.or.id

Redaksi menerima kiriman tulisan/ artikel dari luar. Isi berkaitan dengan air minum dan sanitasi
Foto Cover : Media Tata Ruang

Laporan Khusus



Belum Bebas Buang Sampah Sembarang

31

Orang buang sampah di lahan kosong, khususnya di pinggir jalan, kini masih banyak terlihat kota-kota besar di Indonesia. Keberadaan sampah di lahan kosong ini sering dianggap wajar dan kemudian berkembang menjadi tempat pembuangan sampah (TPS) siluman.

Wawancara



Jakarta Smart City, Mengurai Permasalahan Ibukota

36

Keberhasilan Jakarta Smart City (JSC) dalam mewujudkan Jakarta lebih “pintar” tidak hanya bisa dilihat dari kecanggihan teknologi yang dipergunakan, namun sejauh mana partisipasi masyarakat untuk berkontribusi.

Sosok

Memuluskan Jalan Pembangunan

Dedikasi, sumbangan, dan komitmen Nugroho Tri Utomo dalam mengawal target 100-0-100 diakui oleh para *stakeholder* di bidang pembangunan air minum dan sanitasi.

42

Internasional

Kota Milton Keynes, Tempat Tinggal Impian

Pemerintah Kota Milton Keynes (MK) dengan bangga memperkenalkan tagline “When you know Milton Keynes, You will love Milton Keynes” kepada masyarakat dunia. Pemerintah setempat yakin, keindahan kota yang lahir dari tatanan kota yang baik, kebersihan yang terjaga, serta kebiasaan dan budaya masyarakatnya yang teratur menjadikan Milton Keynes sebagai kota idaman.

47

Teknologi

Rumah Cerdas Bikin Hidup Lebih Mudah dan Bergairah

Kemajuan teknologi yang melahirkan produk inovatif telah mengubah cara hidup manusia secara radikal. Teknologi digital telah mengubah dunia di sekitar kita, menghancurkan batas-batas ruang.

51

Kilas

- Para Duta Sanitasi Berkumpul di Ancol
- Pak Nugroho Buka Kick-Off Nasional PPSP
- Akkopsi Gelar Forum AHL
- Peluncuran Aplikasi STBM Smart
- Surabaya jadi Tuan Rumah Prepcom 3 UN Habitat II
- Berbagai Cerita dalam Forum Inspirasi “Air Untuk Semua”

55

56

57

Resensi

- Keberhasilan PAMSIMAS Mendunia
- Permukaan untuk Jakarta Makin Nyata
- Jejak Keberhasilan para Inspirator AMPL
- Mentransfer Semangat Para Champion

58

59

Percik

Susunan Redaksi

Diterbitkan oleh: Kelompok Kerja Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Nasional **Penanggung Jawab:** Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman BAPPENAS, Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat **Pembina:** Tri Dewi Virgianti **Penasihat:** Oswar Mungkasa **Pemimpin Redaksi:** Nurul Wajah Mujahid **Redaktur Pelaksana:** Eko Wiji Purwanto, Laiza Wahanuddin **Editor:** Aldy Mardikanto, Ira Lubis **Tim Penyusun:** Nur Aisyah Nasution, Fany Wedahuditama, Sheny Diah Puspita, Tiara Anggita, Rini Harumi Wanasita, Rima Nadhira, Kania Mayang Lestari, Alia Rasmaya, Amos Gracianto, Dwieanita Ayuningtyas, Islahuddin, Syifa Faiziah, **Desain:** Hengki **Sirkulasi/Sekretariat:** Coursalina





A large, sprawling pile of garbage and waste, primarily brown and grey in color, filling most of the frame. In the bottom left corner, a person wearing a yellow shirt and dark pants is walking through the waste. The background is a vast expanse of this waste material, suggesting a landfill or a large-scale waste management site.

DARURAT SAMPAH

Produksi sampah Jakarta setiap harinya diperkirakan mencapai 7.000 ton, sementara yang masuk ke TPA Bantar Gebang (satu-satunya TPA untuk Jakarta) berdasarkan data Pemprov DKI Jakarta sekitar 6.419 ton per hari (tahun 2015). Berarti masih banyak yang belum terangkut. Selain itu beban TPA Bantar Gebang pun semakin berat, karena jumlah sampah yang masuk makin bertambah.

TPA juga tidak pernah menyelesaikan masalah, jika sampah dikelola dengan cara “dikumpulkan, diangkut, dan dibuang”. Sampah harus dikelola dengan cara “dipilih, dipilah, dan diolah”.

FOTO: RISKY ANDRIANTO/ANTARA

Beban Ibukota yang Kian Berat

DKI Jakarta ibarat sebuah cawan yang penuh air. Dia tidak bisa menampung pertumbuhan dan pendatang yang ada. Akibatnya pertumbuhan itu meluber ke kota-kota penyangga di sekeliling Ibukota.

Berdasarkan Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta 2015, pada tahun 2014 penduduk DKI Jakarta meningkat menjadi 10,08 juta (meningkat hampir 105 ribu jiwa setahun) atau dapat dikatakan secara rata-rata penduduk Jakarta setiap jamnya bertambah 12 orang.

Berdesakan di KRL Commuterline atau mengalami macet di jalanan menuju tempat kerja di Jakarta adalah sebuah pemandangan sehari-hari yang sudah biasa dialami oleh pekerja yang mencari nafkah di Ibukota. Bagi mereka, ini adalah konsekuensi tinggal di pinggiran Jakarta termasuk di kota-kota penyangga yaitu Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi).

Novie Afanti, salah satu pengguna setia KRL menyebutkan, ia yang tinggal di Perumahan Puri Kukusan

Kecamatan Beji Kota Depok, memilih naik KRL ke tempat kerjanya di Tebet Jakarta Selatan setiap harinya. Ibu satu anak ini rela berdesak-desakan di ruang KRL yang sangat padat di pagi hari agar tidak telat datang ke kantor. Saat tiba di Stasiun Tebet, Novie masih harus menggunakan jasa ojek guna menjangkau kantor production house tempat dia bekerja yang memang tidak jauh dari stasiun. "Memilih tinggal di Depok adalah pilihan logis bagi kami mengingat harga rumah di Jakarta sudah sangat mahal dan mungkin tidak terbeli," ujar Novie kepada PERCIK.

Pengalaman serupa juga dialami oleh Ahmad Fatoni, pengguna KRL yang bekerja di daerah Jakarta Selatan dan saat ini tinggal di Perumahan Gemilang I Citayam Kabupaten Bogor. Fatoni mengaku sejak beberapa tahun terakhir, perumahan di

Citayam berkembang pesat. Banyak perumahan baru yang dibangun. Harganya pun cenderung merangkak naik. Dia bercerita, pada sekitar 4 tahun lalu membeli rumah di Citayam harganya baru sekitar Rp110 juta rupiah untuk ukuran 36 M2 dengan luas tanan 60. Namun harga di perumahan baru untuk ukuran yang sama sudah mencapai hampir Rp200 juta, bahkan ada yang lebih. "Harga perumahan di Citayam cukup terjangkau. Akses kereta pun lancar, kecuali jika ada gangguan listrik atau adanya KRL anjlok," jelas Fatoni.

Berbeda dengan dua orang di atas yang mengandalkan KRL untuk menjangkau tempat kerja, Pretty Nisa mengandalkan mobil pribadi untuk menempuh perjalanan dari Pekayon Bekasi ke kantornya di Jl Gatot Subroto Jakarta. Wanita yang bekerja di salah satu bank swasta ini setiap hari ditemani sopir selama

Berdesakan di KRL Commuterline merupakan pemandangan sehari-hari di Ibukota



FOTO: BERITATRANS.COM



Warga yang bekerja dan hidup di Jakarta sudah terbiasa dengan kemacetan penyangga

perjalanan. "Kemacetan setiap hari sangat parah, terutama dari Bekasi. Meskipun kami bisa lewat jalan tol, tetap saja tidak bebas hambatan. Saya berusaha tidak mengeluh, karena tidak ada gunanya dan tidak bisa membuat jalanan lancar. Jadi kalau saya mah dijalani aja. Toh mau mengeluh juga sudah terlanjur, hampir 15 tahun kerja di Jakarta," ungkap ibu tiga anak asal Tasikmalaya ini.

Kendala transportasi seperti yang disampaikan beberapa orang di atas adalah sebuah konsekuensi dari berkembangnya sebuah kota. Para pendatang, harus rela tinggal di kota-kota penyangga untuk bisa tetap mengakses ibukota. Pertumbuhan permukiman di kota-kota penyangga terus meningkat. Kota Jakarta akhirnya tidak bisa dipisahkan dengan kota-kota di sekitarnya dan membentuk

sebuah Kota Metropolitan yang biasa disebut dengan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi).

Permasalahan di kota-kota metropolitan tidak hanya apa yang terlihat di permukaan seperti yang dialami oleh mereka yang harus menghadapi kemacetan setiap hari, namun juga masalah yang selama ini belum banyak diperkirakan orang seperti ancaman penurunan permukaan tanah akibat pengambilan air tanah secara masif.

Kota Pinggiran Tumbuh dengan Cepat

Dalam sebuah penelitian berjudul "*Urban Sprawl Effects on Settlement Areas in Urban Fringe of Jakarta Metropolitan Area*," yang dipublikasikan di *Journal of Environment and Earth Science* pada 2013 lalu disebutkan bahwa

pertumbuhan Metropolitan Jakarta, secara fisik ditandai dengan pertumbuhan pinggiran kota yang cepat. Permukiman tumbuh dan cenderung meluas dan tersebar secara acak serta keluar dari kontrol (fenomena *urban sprawl*).

Penelitian yang dilakukan Janthy Trilusianthy Hidajat dan beberapa orang lainnya itu memberi fokus perhatian pada pertumbuhan perumahan di Kecamatan Cimanggis Depok. Pada periode 1982-2000, pembangunan perumahan kelas menengah bawah dilakukan dalam skala kecil di kecamatan ini, karena dekat dengan Stasiun Depok Baru dan harga tanahnya kala itu relatif murah. Dalam perkembangannya, pembentukan Kota Depok sebagai kota madya yang terpisah dari Kabupaten Bogor pada 1999, menyebabkan banyak pemukiman baru

dalam skala kecil dan besar di pinggiran kota. Permukiman dalam skala kecil dan berdiri sendiri yang tumbuh di Depok tidak terhubung dengan sejumlah fasilitas kota yang ada, karena banyak rumah yang didirikan secara mandiri tidak memikirkan tatanan kota yang ada.

Pertumbuhan permukiman semakin tidak terkendali dan tidak beraturan pada periode 2000-2005. Permukiman tumbuh sepanjang jalan utama. "Kondisi ini terjadi dan terus membesar dengan cepat karena dipicu oleh perkembangan pesat perumahan besar dan skala menengah oleh pengembang swasta yang tidak terintegrasi," tulis laporan tersebut.

Harga tanah di Cimanggis dan sekitarnya, termasuk Kecamatan Tapos yang relatif murah memicu berbagai pertumbuhan bangunan, tidak hanya permukiman, tapi

juga perkantoran dan fasilitas ekonomi. Pada periode 2005-2010, wilayah Cimanggis dan Tapos Kota Depok sudah cukup padat dengan berdirinya banyak perumahan, gedung komersial, hingga kegiatan jasa dan industri. "Pertumbuhan pembangunan permukiman meningkat karena adanya akses ke inti kota, seperti pembangunan infrastruktur jalan raya dan alteri yang sudah direncanakan. Kondisi ini membuat pertumbuhan permukiman melalui batas administrasi," terang penelitian ini.

Pertumbuhan yang tidak terkendali sebagai efek dari *urban sprawl* ini rupanya memberi dampak negatif terhadap pembangunan berkelanjutan Cimanggis dan sekitarnya. Pertumbuhan cepat dari kawasan permukiman membuat pembangunan di daerah tersebut kurang berkelanjutan. Banyak area

hijau yang kemudian menjadi perumahan baru dalam skala besar. Pertumbuhan permukiman seperti di Cimanggis pada khususnya, dan Depok pada umumnya juga terjadi di banyak titik di kota-kota penyangga. Permukiman di Depok yang berkembang sejak dekade 1980-an membuat daerah ini dikenal juga sebagai kawasan permukiman untuk para pekerja yang bekerja di Jakarta. Namun seiring perkembangan Metropolitan, saat ini para pengembang, baik kecil maupun besar berusaha mendapatkan tanah yang masih kosong untuk dibangun sebagai perumahan. Bisnis ini memang tidak bisa dipisahkan dari pertumbuhan kota yang pesat.

Kekhawatiran muncul ketika masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan tidak memiliki akses terhadap ruang lahan permukiman. Mereka akan mencari tempat tinggal dan bermukim di pinggiran kota.



Banjir menjadi masalah klasik yang dihadapi oleh Jakarta yang turut disumbangkan kota penyangga

FOTO: MEDIA INDONESIA

Tanpa pembinaan, pengawasan, dan penyediaan infrastruktur dasar, kecenderungan tersebut berpotensi menyebabkannya tumbuhnya permukiman kumuh. Fenomena tersebut dapat dijumpai di daerah Bekasi, Bojong, Citayam, dan Depok, dimana mulai ditemukan perumahan dan permukiman yang padat dengan jalanan sempit tanpa layanan air minum, persampahan, dan drainase. Sampah berserakan di tanah-tanah tak bertuan. Jalanan menjadi saluran air di saat hujan dan menciptakan genangan di permukiman. Fakta tersebut harus segera ditanggulangi sebelum segalanya terlambat menjadi permasalahan kompleks dan rumit.

Bergantung pada Kota Penyangga

Banyaknya kota yang tergabung dan saling terintegrasi dalam Metropolitan Jabodetabek membutuhkan sebuah koordinasi dan kerjasama antar kota. Koordinasi ini menjadi sangat penting, karena selain perbedaan kota dan wilayah administrasi, kota-kota dalam Jabodetabek juga berada di tiga provinsi yang berbeda yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Ada beberapa lembaga yang mengkoordinasi berbagai hal yang terkait Jabodetabek. Untuk masalah sungai ada Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) yang berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Lembaga yang didirikan pada 2008 ini Unit Pelaksana Teknis yang bertugas untuk

membantu wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi dalam penyusunan rancangan pola pengelolaan sumber daya air. Secara administratif Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane meliputi 3 provinsi yaitu Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Ada 10 kota dan 4 kabupaten yang dilewati sungai besar ini.

Masalah sungai memang menjadi perhatian Kota Metropolitan. Di Kawasan Jabodetabek, sungai mempunyai posisi penting karena dipergunakan sebagai sumber air PDAM dan sering dianggap sebagai penyebab banjir di musim hujan.

Sementara itu untuk masalah transportasi, ada Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (BPTJ) di bawah Kementerian Perhubungan. Menurut Oswar Mungkasa, Deputy Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, peran lembaga yang didirikan pada tahun 2016 cukup terlihat. Transportasi secara luas memberikan dampak pada lingkungan. Pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berusaha mengurangi jumlah kendaraan yang beredar dan masuk ke ibukota. Diantaranya adalah memperluas layanan Trans Jakarta ke beberapa kota penyangga.

Ketua BPTJ, Elly Adriani Sinaga saat hadir dalam diskusi yang mengangkat tema "Mengatasi Macet di Jabodetabek" di Ancol (10/8) menyampaikan, dalam jangka

dekat, diharapkan *share* pengguna angkutan umum bisa mencapai 40%. Pemerintah memang melakukan sejumlah upaya untuk memindahkan angkutan pribadi ke angkutan massal di wilayah Jabodetabek. Saat ini saja pemerintah terus mengembangkan dan membangun angkutan massal perkotaan seperti LRT (*Light Rail Transit*), MRT (*Mass Rapid Transit*), BRT (*Bus Rapid Transit*), KCJ (KAI Commuter Jabodetabek) dan pembangunan rel kereta api ganda (*double track*).

Selain dua lembaga koordinasi di atas, ada juga Badan Kerjasama Provinsi (BKSP) yang juga meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten, namun peran lembaga ini belum terlihat. BKSP sebenarnya sangat diharapkan untuk bisa mengambil peran dalam mengurangi sejumlah beban Metropolitan Jabodetabek di masa mendatang.

Walikota Bogor Bima Arya menuturkan selama ini koordinasi secara formal antar kota di Jabodetabek kurang berjalan. Dia akhirnya lebih memilih komunikasi non formal dengan para kepala daerah lain di Jabodetabek. Bima setuju jika di masa mendatang, jabatan Gubernur DKI Jakarta bisa setingkat menteri yang bertanggung jawab untuk mengurus ibukota dan sekitarnya. Sehingga koordinasi bisa lebih baik.

Yang Tak Terlihat Mata?

Pada umumnya, masyarakat memiliki pandangan terhadap permasalahan ibukota hanya yang dapat divisualisasikan seperti pertumbuhan

permukiman dan kemacetan. Sebenarnya, ada permasalahan lain yang tak terlihat oleh mata dan sudah seharusnya mendapat perhatian khusus, yaitu air minum dan sanitasi.

Sebagai kota terpadat di Indonesia, akses air minum penduduk Jakarta seharusnya menggunakan sistem jaringan perpipaan. Pada kenyataannya, berdasarkan Laporan Kinerja PDAM Wilayah II, pada tahun 2014 cakupan layanan perpipaan air minum hanya mencapai 61,4%. Hal ini menandakan bahwa sebagian dari penduduk Jakarta lainnya masih menggunakan air tanah untuk aktivitas sehari-hari. Air tanah yang diambil secara terus menerus akan menurunkan muka tanah dan menyebabkan berkurangnya daratan ibukota.

Permasalahan lain yang tidak bisa terlepas dari konteks air minum adalah sanitasi. Lebih dari 90% pengelolaan air limbah di Jakarta menggunakan

menggunakan sistem *on site* (pengelolaan setempat / tangki septik). Sedangkan, cakupan layanan sistem *off site* (IPAL komunal / sistem jaringan) hanya mencapai 2%. Tingginya penggunaan sistem *on site* tentunya akan berdampak buruk terhadap lingkungan, seperti pencemaran pada air tanah. Padatnya penduduk ibukota menyebabkan jarak antara tangka septik dan sumur tidak sesuai dengan standar, sehingga menyebabkan sumur tercemar. Air tanah tercemar tersebut tentunya akan memberikan dampak negative terhadap kesehatan masyarakat.

Masih berbicara soal sanitasi, padatnya kota Jakarta menyebabkan tingginya produksi sampah. Jumlah timbulan sampah ibukota sudah melebihi kapasitas Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang. Saat ini, produksi sampah Jakarta sudah mencapai 7000 ton/hari,

sedangkan jumlah produksi sampah yang masuk ke TPST Bantar Gebang hanya 6.419 ton/hari. Hal ini menandakan bahwa masih ada sampah yang tidak terangkut ke TPST yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, seperti air, tanah, dan sebagainya. Untuk mengurangi dampak produksi sampah tersebut, diperlukan strategi yang dilakukan oleh seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Strategi tersebut dapat dimulai dari perubahan perilaku diri sendiri.

Bervariasinya permasalahan yang terjadi di Jakarta dapat dilihat dari kawasan kumuh di ibukota, seperti di hunian ilegal yang terletak di bantaran sungai atau rel kereta api. Padatnya kota menyebabkan mereka harus membangun tempat tinggal yang tidak layak, yang memiliki keterbatasan untuk akses air minum dan sanitasi.

■ SYIFA FAUZIAH/ISLAHUDDIN



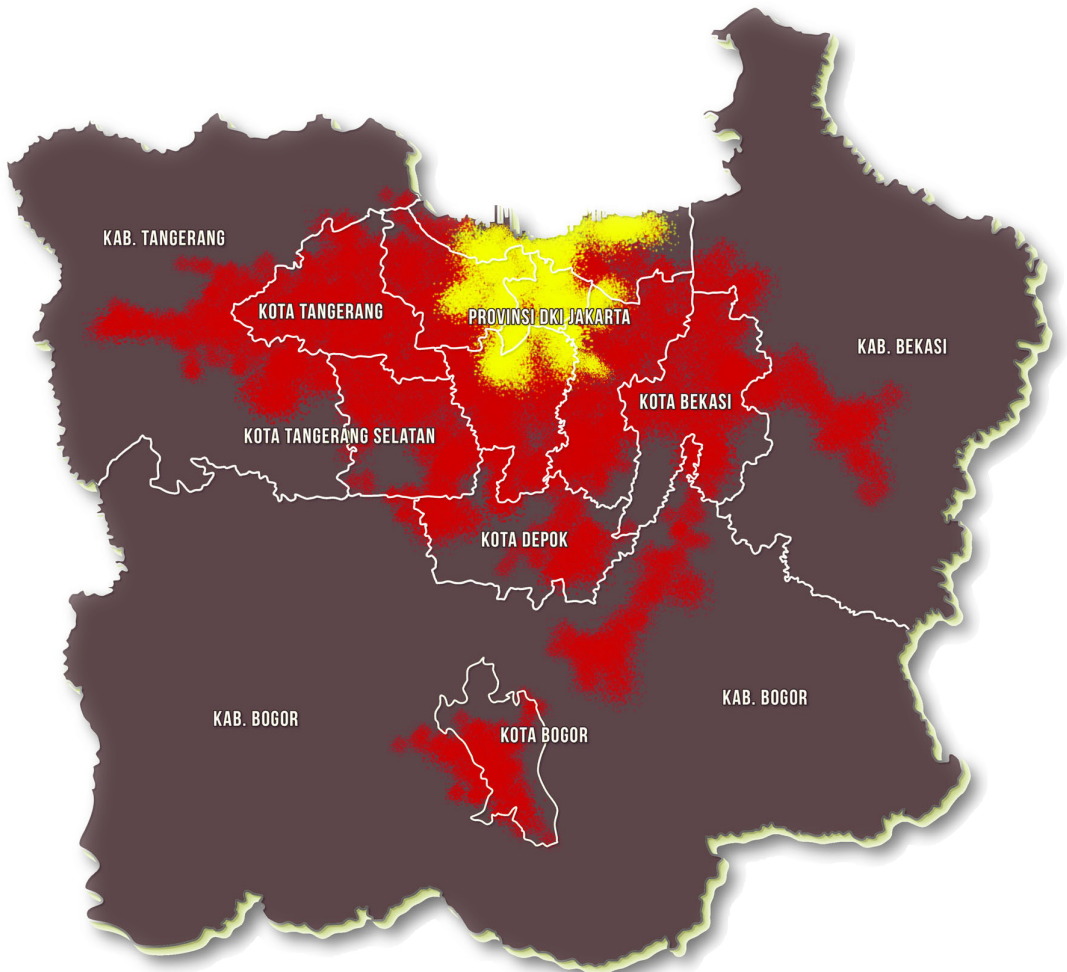
Permukiman di Kota Bogor semakin padat

FOTO: THOMAS

BEBAN METROPOLITAN

Masalah kota-kota metropolitan semakin hari semakin menumpuk.

Pertumbuhan penduduk yang pesat, arus urbanisasi, produksi sampah yang terus meningkat, permukiman yang terus menjamur, dan lainnya bisa tragedi lingkungan di kemudian hari jika tidak bisa dilesaikan dengan cepat. Penyelesaiannya pun tidak boleh parsial, namun harus komprehensif. Jika tidak, penyelesaian masalah hanya akan melahirkan masalah baru.



Keterangan:



Penyebaran penduduk urban tahun 1972



Penyebaran penduduk urban tahun 2005

Penduduk Metropolitan

DKI Jakarta



= **10,177** juta jiwa (2015)

- Kepadatan **15.234** orang per km² (2014)

- Penduduk Jakarta di siang hari lebih dari **12 juta** orang

- Pendatang baru ke Jakarta = **68.537** orang 2014

Kota Bekasi

= **2,665** juta jiwa (2014)

Kab Bekasi

= **2,991** juta jiwa (2014)

Kota Depok

= **2,033** juta jiwa (2014)

Kota Bogor

= **1,030** juta jiwa (2014)

Kab Bogor

= **5,331** juta jiwa (2014)

Kota Tangsel

= **1,492** juta jiwa (2014)

Kab Tangerang

= **3,157** juta jiwa (2013)

Kota Tangerang

= **2,047** juta jiwa (2015)



Penumpang Kereta



2011 = **331** ribu/hari

2016 = **850** ribu/hari (data per Juni 2016)

2019 = **1,2** juta/perhari (target)

Busway



Hingga akhir 2014 telah beroperasi

12 koridor busway dengan **669** bus

Sampah Jakarta

- Produksi Sampah : ±**7.000** (2015)

- Sampah masuk TPST Bantar gebang = **6.419** ton/hari (2015)

- Setiap orang di Jakarta memproduksi sampah 1kg/hari

- Sampah organik **53,7%**

- Sampah non organik **46,3%**

- Bank sampah **376** bank





Berpacu dengan Pertumbuhan yang Tidak Pernah Pelan

Setiap tahunnya ada ratusan ribu rumah tangga baru yang bertambah di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). Bertambahnya jumlah rumah tangga ini juga menandakan tumbuhnya permintaan rumah baru di wilayah Metropolitan tersebut.

Perumahan *cluster* merupakan salah satu konsep favorit yang banyak diminati oleh para konsumen sejak beberapa tahun terakhir. Para pengembang pun berlomba-lomba untuk membuat perumahan *cluster* agar bisa

mendapatkan konsumen yang besar dalam waktu cepat. Perumahan *cluster* merupakan kumpulan rumah yang hanya memiliki satu akses keluar masuk kendaraan. Hal yang paling menonjol dari konsep ini adalah sistem keamanannya yang dinilai lebih terjamin,

karena tidak ada alur keluar-masuk selain gerbang utama. Antara perumahan dengan lokasi luas biasanya dibatasi dengan tembok atau deretan rumah berbentuk huruf “U” yang hanya terbuka di depan.

Sejumlah penghuni rumah mengaku cukup aman tinggal di



FOTO: OKEZONE.COM

perumahan cluster. Pengakuan ini misalnya disampaikan Mohammad Yasin (33), ayah satu anak yang tinggal di Cluster Alam Asri 1 yang berada dalam kawasan Perumahan Villa Dago Pamulang Tangerang Selatan. Dia percaya pihak keamanan perumahan bisa menghalau adanya pencurian, dia juga tidak khawatir anaknya akan mudah tertabrak kendaraan bermotor. Di gerbang perumahan ada empat satpam yang siap menjaga 24 jam secara bergiliran. Jumlah rumah di cluster tersebut berjumlah sekitar 70 rumah. "Di daerah Villa Dago ini perumahan memang berbentuk *cluster-cluster*. Hanya rumah yang berada di jalan utama saja yang tidak berbentuk *cluster*," ujar Yasin kepada PERCIK.

Memilih tinggal di perumahan berkonsep *cluster* juga dilakukan oleh Andika Mustaqim (33). Ayah satu anak ini menempati salah satu rumah di Cluster Sasmita Fortuna yang terletak di Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang,

Tangerang Selatan. Dia sengaja memilih rumah di Pamulang karena jaraknya terjangkau dari tempat kerjanya di Jakarta. Perumahan yang dia tempati hanya terdiri dari 22 rumah. Rumah disusun memanjang menjadi dua baris dengan masing-masing baris berisi 11 rumah yang saling berhadapan. Jarak antar rumah yang berhadapan sekitar 5 meter. Mengingat pendeknya jarak, pemilik rumah yang mempunyai kendaraan roda empat dilarang memarkir kendaraannya di depan rumah, karena dipastikan akan menghalangi jalan.

"Rumah-rumah di *cluster* ini ukuran tanahnya 60-70 M2. Mengingat jumlah rumah tidak banyak, kami merasa seperti keluarga besar. Kami tidak pernah ada masalah dengan sistem drainase karena memang perumahan kami ada di dataran yang lebih tinggi dibandingkan lingkungan sekitar. Sistem drainase kami tersambung dengan drainase lingkungan sekitar perumahan," kata Andika.

Rumah berkonsep *cluster* memang harus memastikan air limpasan hujan mereka bisa keluar kompleks perumahan. Namun belum tentu aliran air limpasan hujan mereka tidak mengganggu lingkungan sekitar, bahkan sejumlah perumahan *cluster* bisa menjadi pemicu munculnya banjir di daerah sekitarnya. Sejumlah kepala daerah di kota-kota penyangga pun mengakui bahwa pertumbuhan perumahan yang terus meningkat, terutama bermunculannya perumahan *cluster* mengakibatkan banjir di daerah mereka. Pengakuan ini



Sejumlah kepala daerah di kota-kota penyangga pun mengakui bahwa pertumbuhan perumahan yang terus meningkat, terutama bermunculannya perumahan cluster mengakibatkan banjir di daerah mereka.

misalnya pernah disampaikan oleh Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad kepada wartawan pada 13 Maret 2016 silam. Idris saat itu mengaku akan melakukan penertiban izin perumahan *cluster*. “Kami akan kontrol drainase untuk menanggulangi banjir di Depok. Kami juga akan menertibkan perizinan pembangunan *cluster-cluster* yang kontrolnya sangat kurang,” ujar Idris saat itu

Permasalahan drainase rupanya tidak hanya dihadapi penghuni perumahan *cluster*. Banyak perumahan yang bukan berkonsep *cluster* pun mengalami hal yang sama, seperti yang dialami oleh warga perumahan Benda Baru Pamulang. Menurut Ahmad Firdaus (28), salah satu penghuni perumahan Benda Baru, saat ini banyak got menyempit bahkan hilang di perumahan mereka. Banyak saluran air tersumbat karena tidak ada kegiatan gotong royong dan kebersamaan antar warga mulai luntur. Dia mencontohkan, ada beberapa saluran air depan rumah (got) yang ditutup. Akibatnya, aliran air dari rumah sebelah tidak berjalan dan mampet. Kondisi ini makin lama makin memprihatinkan.

Masalah drainase yang ditambah dengan makin banyaknya perumahan yang muncul juga membuat perumahan Benda Baru pun kini selalu dilanda banjir saat hujan deras datang. Padahal dahulunya, perumahan yang didirikan tahun 1994 ini belum pernah dilanda banjir. “Baru pada sekitar lima tahun terakhir banjir di perumahan Benda Baru seakan menjadi langganan.

Menurut perhatian saya, ini karena disebabkan semakin banyaknya bermunculan perumahan baru. Jika dulu banyak ruang terbuka, kini sudah hilang berganti perumahan, khususnya perumahan yang didirikan pengembang. Banjir juga disebabkan perilaku buruk warga yang masih suka buang sampah sembarangan sehingga kali besar di dekat perumahan pun sering penuh dengan sampah,” ujar Firdaus.

Semakin banyaknya perumahan yang tumbuh tidak terkendali juga menyebabkan masalah lingkungan lainnya seperti menurunnya permukaan air tanah, karena banyak warga yang memanfaatkan air tanah secara masif. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang P.S. Brodjonegoro, semua pihak perlu juga memberikan perhatian besar pada pemakaian air tanah. Dia menyebutkan, saat ini pertumbuhan permukiman jauh lebih besar dibanding pertambahan jaringan air perpipaan. Hal ini menyebabkan

FOTO: SYIFA FAUZIAH



Salah satu perumahan *cluster* di Kota Depok

banyak rumah tangga yang berusaha memenuhi kebutuhan air mereka dengan membuat sumur bor. Di Jakarta yang



Dalam Jakarta sendiri masih banyak wilayah yang belum dijangkau oleh jalur distribusi PDAM. Kita tidak bisa menyalahkan mereka yang mencari air dengan cara mengebor sendiri, karena belum bisa memenuhi kebutuhan mereka melalui perpipaan PDAM.



merupakan ibukota pun masalah ini sangat mudah didapati, khususnya di Jakarta Timur dan Jakarta Barat, jumlah permukiman yang belum mampu mengakses air perpipaan sangat besar.

Menurut Menteri PPN, idealnya sebelum pembangunan permukiman, baik itu yang dibangun secara mandiri oleh masyarakat maupun disediakan pengembang, terlebih dahulu harus dipastikan adanya dukungan jaringan air bersih. "Tidak setiap rumah mencari sumber airnya sendiri-sendiri, tidak juga *real estate*-nya yang mencari, tapi lebih baik

disediakan oleh pemerintah atau sistem yang disediakan oleh *real estate* untuk bisa memberi jaringan air bersih dengan jaringan pipa," ujar Bambang saat menghadiri Forum Inspirasi bertemakan 'Air Untuk Semua' yang diadakan oleh Jejaring AMPL pada 26 Oktober 2016.

Bambang menambahkan, membuat sumur bor berpotensi menurunkan permukaan tanah. Namun semua pihak tidak bisa menyalahkan begitu saja masyarakat yang terpaksa membuat air bor saat tidak ada jaringan pipa air bersih, karena mereka sangat membutuhkan air untuk semua kegiatan

sehari-hari. Menurut Bambang, PDAM harus bisa memperluas layanan mereka, khususnya di daerah perkotaan. "Dalam Jakarta sendiri masih banyak wilayah yang belum dijangkau oleh jalur distribusi PDAM. Kita tidak bisa menyalahkan mereka yang mencari air dengan cara mengebor sendiri, karena belum bisa memenuhi kebutuhan mereka melalui perpipaan PDAM," tambah Bambang.

Menurut Bambang, akses air minum dan sanitasi adalah hak semua orang, baik di kota maupun di desa sama saja. Setiap daerah mempunyai tantangan dan cara sendiri untuk pemenuhan air bersih. Tantangan ini belum lagi ditambah dengan masalah pengolahan air limbah yang memang sangat berkaitan erat dengan pemenuhan akses air minum dan sanitasi. Di Jakarta saja, penanganan air limbah secara terpusat hanya mencakup 2% dari areal ibukota.

Kekhawatiran Menteri PPN tentang penurunan permukaan tanah saat ini sebenarnya sudah terjadi. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bahkan melihat fenomena penurunan permukaan tanah ini sudah terjadi pada dekade 1980-an. Indikasi ini misalnya terlihat saat runtuhnya Jembatan Sarinah yang terbentang sepanjang 40 M di atas Jl Wahid Hasyim Jakarta Pusat pada 28 Februari 1981. Pemakaian air tanah yang meningkat, khususnya karena pertambahan penduduk akibat urbanisasi yang tidak kunjung henti membuat permukaan tanah menurun. "Urbanisasi juga dapat menyebabkan

meningkatnya tutupan lahan yang kedap air, genangan air, keperluan perumahan, aliran permukaan, titik sumber imbuhan kontaminasi, dan berkurangnya daerah bermain,” tulis Robert M Delimon dan Makoto Taniguchi dalam buku “Ancaman Bawah Permukaan Jakarta” yang diterbitkan LIPI pada Desember 2015.

Sampah Belum Terselesaikan

Sampah juga menjadi masalah yang hingga saat ini belum terselesaikan di kota-kota besar terutama di Jakarta dan sekitarnya. Selama ini pemerintah daerah setempat lebih memperhatikan bagaimana membuat sampah secara efektif hingga tempat pembuangan akhir (TPA) sampah, belum memperhatikan bagaimana mengolah dari hulu. Padahal saat ini sudah ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang diikuti dengan

Peraturan Pemerintah (PP) No.81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang

“TPA seharusnya menjadi tempat pengolahan akhir, bukan pembuangan akhir. Pengolahan pertama adalah di rumah-rumah warga. Jika warga ikut memilah dan turut mengolahnya maka jumlah sampah yang dikirim ke TPA akan berkurang secara signifikan.

mengharuskan pengolahan sampah dari hilir. Menurut Wilda Yanti, CEO PT Xaviera Global Synergy yang juga praktisi bank sampah, secara faktual Jakarta dan sekitarnya sudah tergolong darurat sampah. Hal ini diantaranya ditunjukkan dengan tidak memiliki TPA sendiri dan tidak ada pengelolaan sampah kawasan sebagaimana amanat regulasi persampahan. Sementara volume sampah terus meningkat. Kondisi ini membuat Gabungan Pengelola Bank Sampah Jakarta pernah menyampaikan petisi kepada Gubernur DKI Jakarta untuk menjalankan regulasi yang ada, khususnya Pasal 13 UU.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. UU ini berlaku efektif

sejak Tahun 2013, bahwa intinya tidak boleh lagi ada pengangkutan sampah secara besar-besaran ke TPA, tetapi harus dikelola di TPST-3R. “Jika masalah sampah yang ditangani dengan mengangkutnya ke TPA, maka TPA itu tidak akan pernah menyelesaikannya, apalagi jumlah sampah terus meningkat sementara kapasitas TPA sangat terbatas. TPA seharusnya menjadi tempat pengolahan akhir, bukan pembuangan akhir. Pengolahan pertama adalah di rumah-rumah warga. Jika warga ikut memilah dan turut mengolahnya maka jumlah sampah yang dikirim ke TPA akan berkurang secara signifikan,” jelas Wilda.

Pemda juga bisa mendorong kecamatan dan kelurahan untuk membentuk TPST dengan berbasis komunal orientasi ekonomi dengan memberi pendampingan manajemen, teknologi dan pemasaran produk daur ulang. Upaya yang dilakukan sejak di hilir ini akan mengurangi beban masalah ibukota dan sekitarnya yang setiap tahun terus meningkat seiring pertumbuhan orang dan permukiman.

■ ISLAHUDDIN

FOTO: ISLAHUDDIN



Bank Sampah di DKI Jakarta

Pembangunan Harus Integratif dan Perhatikan Aspek Lingkungan



FOTO: RINI HARUMI

Kepala daerah di kota-kota penyangga Ibukota menyadari bahwa penduduk dan permintaan permukiman di wilayah mereka tumbuh pesat. Dua masalah ini kemudian berimbas pada munculnya masalah lain seperti lingkungan, sehingga perlu mendapatkan perhatian serius.

Kota-kota penyangga ibukota mengalami masalah yang hampir sama, yaitu pertumbuhan penduduk yang pesat karena urbanisasi, permintaan permukiman sangat tinggi, hingga masalah kemacetan karena pesatnya pertumbuhan kendaraan bermotor. Semua masalah itu bisa berimbas pada tragedi lingkungan jika tidak diatasi dengan tepat dan terintegratif.

Walikota Bogor, Bima Arya mengakui, sebagai kota penyangga, Bogor juga mengalami hal yang sama. Apalagi kota ini menjadi favorit pengembang untuk membangun properti. Lalu apa yang dilakukan Bima untuk mengantisipasi dan mengurai masalah yang ada. Berikut wawancara Majalah PERCIK dengan walikota Bogor tersebut.

Bagaimana perkembangan Bogor selama ini ?

Bogor mengalami perubahan yang sangat cepat dalam berbagai macam aspek. Jumlah penduduk terus bertambah, pertumbuhan ekonomi relatif di atas rata-rata. Kelas menengah tumbuh secara signifikan. Bogor juga menjadi tujuan favorit untuk Jakarta dan sekitarnya. Dampaknya adalah keinginan untuk tinggal di Bogor dari warga Jakarta dan sekitarnya juga meningkat. Minat untuk membangun properti di Bogor juga terus bertambah. Pembangunan kota pun harus siap untuk mengantisipasi arus urbanisasi tersebut.

Apakah semua upaya yang dilakukan sudah cukup efektif untuk mengantisipasi sejumlah persoalan kota?

Pemerintah mempunyai sejumlah program. Pertama, bagaimana kita memperbaiki moda transportasi. Ini persoalan serius di Kota Bogor. Kendaraan bermotor tumbuh 14% pertahun, sementara pertumbuhan jalan hanya 0,1%. Kita membangun

infrastruktur transportasi yang mengutamakan angkutan umum dan memaksa publik untuk naik kendaraan umum. Kita sedang melakukan tahapan-tahapan reformasi angkot menuju transportasi massal yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kita bangun pedestrian-pedestrian di pusat kota, untuk mendukung infrastruktur ramah lingkungan dan berkelanjutan.



“

Bogor menjadi tujuan favorit untuk Jakarta dan sekitarnya. Dampaknya adalah keinginan untuk tinggal di Bogor dari warga Jakarta dan sekitarnya juga meningkat. Minat untuk membangun properti di Bogor juga terus bertambah

Kami juga melakukan upaya mengkonversi Angkot (angkutan kota) menjadi bis. Kami membangun *shelter* dan memperbaiki terminal. Ke depannya, Bogor akan bertumpu pada prasarana transportasi umum. Kedua adalah mewujudkan kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, RTH diperbanyak, taman-taman kota dirawat. Akses air bersih, pengelolaan drainase terus diperbaiki untuk menyeimbangkan irama pertumbuhan pembangunan.

Dari sisi mobilitas penduduk, seberapa banyak warga Bogor yang melakukan perjalanan ke Jakarta setiap harinya?

Ada sekitar 600 ribu – 800 ribu orang pulang pergi Bogor-Jakarta setiap hari. Sebagian besar menggunakan moda KRL (kereta listrik) dan bis, disusul pemakaian kendaraan pribadi. KRL sekarang berangkat 5 menit sekali. Tahun 2018 mendatang LRT (*Light Rail Transit*) juga akan masuk Bogor. Sementara itu setiap akhir pekan bisa ratusan ribu orang datang ke Bogor untuk berwisata.

Seberapa besar pertumbuhan properti dan bagaimana dampaknya di kemudian hari ?

Orang banyak memilih tinggal di Bogor dibanding daerah sekitar ibukota yang lain, baik alasan cuaca, karakter kota, dan lainnya. Mereka lebih memilih Bogor karena waktu tempuh ke Jakarta relatif sama dengan kota-kota penyangga lainnya. Di Bogor kini sudah diberlakukan zonasi. Permukiman tidak boleh



FOTO: ANTARA/ARIF FIRMANSYAH

didirikan di semua wilayah. Kita juga dorong hunian vertikal. Perizinan AMDAL diperketat. Semua syarat AMDAL harus dipastikan terpenuhi dan memperhatikan aspek lalu lintas, air bersih, RTH (ruang terbuka hijau), persampahan dan lainnya.

Apakah semuaantisipasi berjalan baik dan tidak menimbulkan masalah sepertikebanjiran dan lainnya?

Tentu masih ada masalah. Misalnya ada drainase tersumbat atau berkurangnya RTH yang merupakan ruang serapan. Namun saya terus memastikan adanya wilayah serapan air seperti kolam retensi, ruang resapan, dan sumur biopori. Masyarakat juga semakin kritis. Misalnya beberapa waktu lalu warga memprotes berdirinya apartemen karena diduga menyebabkan banjir di lingkungan mereka. Dugaan itu bisa benar dan tidak atau juga disebabkan dampak lainnya.

Dampak lain seperti apa?

Misalnya ada efek aliran air yang seharusnya bisa diserap di wilayah pembangunan, namun kemudian diketahui air lari kemana-mana. Secara normatif semua izin terpenuhi, namun sebenarnya ada hal lain yang harus dipenuhi. Makanya saya selalu sampaikan kepada dinas terkait, saat menerbitkan AMDAL harus betul-betul akurat dan integratif serta melihat faktor lingkungan secara keseluruhan.

Apakah selama ini pernah ditemukan perumahan yang dibangun tanpa izin?



Bima Arya meninjau rumah warga

FOTO: PEMKOT BOGOR

“ *Kita sedang melakukan tahapan-tahapan reformasi angkot menuju transportasi massal yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kita bangun pedestrian-pedestrian di pusat kota, untuk mendukung infrastruktur ramah lingkungan dan berkelanjutan.*

Tidak ada. Sebab Bogor ini sangat sensitif. Lahan terbatas, ketika ada pembangunan, warga sangat kritis dan pasti melapor. Tidak mungkin sudah ada bangunan yang beroperasi tapi belum ada izin. Masalah yang pernah ditemui hanya sekitar proses serah terima Fasum (fasilitas umum) dan Fasos (fasilitas sosial) dari pengembang ke warga.

Bagaimana dengan perumahan berbentuk cluster

yang di banyak tempat sering menimbulkan masalah ?

Saya perintahkan Wasbangkim (Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman) untuk terus memantau, baik yang sedang dibangun maupun yang sudah dibangun, namun memang personil Wasbangkim terbatas, tidak bisa mengawasi semua. Saya juga minta pihak kelurahan dan kecamatan untuk terus memantau dan memastikan semua pembangunan yang ada

di wilayah mereka memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan.

Bogor adalah tujuan favorit para pengembang, dari yang skala kecil hingga besar. Untuk itu kami memperketat agar jangan sampai kehilangan lahan. Dan warga jangan sampai tersingkirkan. Yang membangun dan menghuni dari pengembang dan orang luar, Bogor sebagian limbahnya dan banyak mudharatnya, ini kita hindari. Dalam banyak pertemuan saya tekankan semua pembangunan properti harus dengan pertimbangan matang. Kita harus detil dampaknya seperti apa. Kadang-kadang secara normatif izin sudah terpenuhi, namun saat kita tarik *zoom out*, ternyata bisa menimbulkan masalah. Jadi sekarang harus melalui kajian yang tepat dan dieskpos bersama.

Contoh, ada bangunan

sebelah Hotel Amaroossa dekat Tugu Kujang. Saya kaget, IMB bangunan sudah keluar, tapi ada persoalan yaitu bisa menimbulkan kemacetan parah karena itu adalah daerah macet dan menutupi akses Jalan Salak, dan kalau pakai air tanah bisa mengancam kebun raya. Begitu dilihat secara integratif tidak memenuhi faktor-faktor lain. Jadi ini diskresi walikota, walaupun mereka bisa saja tidak memperdulikan karena ada IMB. Ada juga supermarket dibangun di daerah Dermaga, sudah saya wanti-wanti untuk tidak dibuka dulu karena setelah saya cek, ada yang belum dilengkapi. Mereka nekat buka, saya datang kesana saya tutup langsung.

Apa sanksi yang diberikan jika ada yang melanggar ?

Ada saksi teguran, denda, hingga bongkar. Seperti McDonald yang sudah dibangun tapi setelah kita lihat *site plan*-

nya berbeda. Akhirnya kami minta bongkar bangunan yang tidak sesuai.

Terkait koordinasi, bagaimana koordinasi selama ini antar kota di Jabodetabek ?

Ada kelemahan dalam sistem koordinasi. Lembaga koordinasi formal kurang berjalan dan sering dilakukan kalau sudah ada masalah. Kami biasanya koordinasi informal melalui *Whats app*, seperti dengan Gubernur DKI Jakarta atau dengan Walikota Tangerang dan lainnya, sebab kalau formal membutuhkan waktu lama. Saya setuju jika Gubernur Jakarta itu setingkat menteri yaitu menteri urusan ibukota dan sekitarnya. Karena Jakarta itu sangat bergantung pada kota-kota penyangganya seperti mengurai kemacetan, hingga banjir sangat bergantung kepada kota penyangga.

■ ISLAHUDDIN/RINI HARUMI

FOTO: ARIF HERMAWAN



Permukiman penduduk di sekitar Sungai Cisadane Kota Bogor



Kampung Bersih
Pacar Keling



Kampung Bersih
Karang Gayam



Lingkungan permukiman tertata rapi, sehat, dan bersih dari sampah

Kampung
Tempe



Pembentukan
kampung
tematik
berdasarkan
profesi
membuktikan
bahwa
Pemerintah Kota
Surabaya sangat
memperhatikan
aspek
pembangunan
sumber daya
manusia

Kampung
Sepatu





Kota Surabaya tidak hanya menunjukkan keberhasilan dalam pembangunan fisik, namun juga peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dengan memenuhi semua aspek kebutuhan dasar seperti akses air minum dan sanitasi. Surabaya juga meningkat SDM yang berkualitas.



Masyarakat mudah mengakses air bersih untuk berbagai keperluan





Semangat remaja untuk berpartisipasi dalam membenahi kota

Melapor Kini Menjadi Gaya Hidup

Masalah kota tidak akan pernah terselesaikan jika masyarakat tidak mau ikut terlibat. Setidaknya, mereka bisa berkontribusi dengan cara melapor dan mengawasi laporan sampai tuntas diselesaikan.

Kini seiring kemajuan teknologi informasi, makin banyak cara untuk melapor. Laporan mereka tidak menjadi

suara tanpa guna, sebab bisa langsung sampai ke instansi terkait. Bukan hanya itu, masyarakat juga bisa mengawasi apakah laporan yang mereka sampaikan sudah diselesaikan atau malah hanya dibiarkan, tidak ditanggapi. Cara melapor yang efektif ini diantaranya dilakukan masyarakat dengan menggunakan aplikasi Qlue.

"Teknologi udah ada. Tinggal kita mau pakai dan berpartisipasi buat perubahan

apa nggak. Kota ini bukan punya pemerintah *doang*, bukan punya sekumpulan *doang*, tapi punya kita semua yang hidup di dalamnya," ujar Daniel, salah satu pengguna transportasi di Jakarta.

Selama melalui aplikasi Qlue, semua warga, khususnya Jakarta, bisa terhubung dengan informasi teranyar di lingkungan mereka sekaligus membantu meningkatkan kondisinya. Menurut Elita Yunanda, Marketing Communications



Teknologi udah ada. Tinggal kita mau pakai dan berpartisipasi buat perubahan apa nggak. Kota ini bukan punya pemerintah doang, bukan punya sekumpulan doang, tapi punya kita semua yang hidup di dalamnya.

“Saat ini user Qlue sudah sekitar 500 ribu orang, dengan total keaktifan mencapai 70-80%. Setiap hari kita terima 40.000 laporan, 5.000-7.000 laporan diantaranya untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah,” jelasnya.

Bukan hanya di Jakarta aplikasi ini menurut Elita,

juga sudah bisa digunakan di seluruh Indonesia. Namun sampai saat ini tidak semua pemerintah daerah sudah bekerjasama dengan Qlue. Pemerintah daerah yang sudah menjalin kerjasama dengan Qlue adalah DKI Jakarta, Manado, Depok, Cimahi, Porbolonggo, dan Bekasi. “Qlue

Manager Qlue, melalui aplikasi ini masyarakat bisa memotong *gap* antara pemerintah dan masyarakat. Dengan menggunakan aplikasi ini, masyarakat bisa melakukan pengaduan mengenai masalah kota atau birokrasi. Sejak diluncurkan Desember 2014, respon sangat baik dari para masyarakat. Tidak hanya dari pihak masyarakat, dari pihak pemerintah dan swasta pun juga. Terbukti saat ini sudah banyak yang menggunakan aplikasi ini.

Contoh kondisi saluran air saat laporan disampaikan dan kondisi setelah ditindaklanjuti.



bisa dimanfaatkan oleh seluruh warga Indonesia bukan hanya Jakarta, karena kalau kalian selalu susah berkomunikasi dengan pemerintah setempat, nah lewat Qlue ini jauh lebih mudah, bahkan bisa nyata ditindaklanjuti,” paparnya.

Aplikasi yang mendorong *smart city* untuk transparansi kinerja pemerintah dan transportasi publik ini ternyata membawa perubahan yang positif. Salah satunya adalah meningkatkan kinerja pemerintah. “Pengaduan warga juga banyak yang ditindaklanjuti. Sekitar 80% laporan yang disampaikan melalui Qlue ditindaklanjuti pihak terkait. Semakin cepat tindakanlanjuti yang dilakukan, maka kepuasan masyarakat terhadap aplikasi Qlue dan kinerja pemerintah semakin



Saat ini user Qlue sudah sekitar 500 ribu orang, dengan total keaktifan mencapai 70-80%. Setiap hari Qlue menerima 40.000 laporan, 5.000-7.000 laporan diantaranya untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah

meningkat,” paparnya.

Elita pun berharap agar setiap kontribusi masyarakat terhadap aplikasi ini dapat menghasilkan perubahan positif. “Kita mau mengajak masyarakat untuk memulai perubahan dari diri sendiri sekecil apapun caranya dengan aktif melapor ke Qlue karena setiap pengaduan kita akan ditindaklanjuti dan berbuah aspirasi positif untuk

kota kita,” tutupnya.

Tidak hanya melalui Qlue, kanal lain juga dilakukan warga untuk melapor. Ada yang menggunakan akun resmi pemerintah, website pemerintah, hingga SMS lain ke nomor yang sudah ditentukan. Kita semua bisa melapor dan mengawasi. Sudahkah Anda melapor hari ini?

■ SYIFA FAUZIAH

FOTO: BERANIBERUBAH.ID



Anak muda makin antusias menggunakan aplikasi pelaporan seperti Qlue



Tumpukan sampah di kebun warga

FOTO: SYIFA FAUZIAH

Belum Bebas Buang Sampah Sembarang

Orang buang sampah di lahan kosong, khususnya di pinggir jalan, masih banyak terlihat kota-kota besar di Indonesia. Keberadaan sampah di lahan kosong ini sering dianggap wajar dan kemudian berkembang menjadi

tempat pembuangan sampah (TPS) siluman.

Jika pertama kali, jumlah pembuang sampah sembarangan hanya satu orang, lambat laun bertambah banyak dan menjadi kebiasaan umum. Munculnya TPS siluman ini misalnya terlihat di Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok,

tepatnya di Jalan Kodongdong, jalan yang biasa dijadikan jalan pintas menuju Jl Raya Margonda dari arah Kecamatan Beji. Sampah menumpuk di sebuah lahan kosong milik warga. Padahal di lahan itu tidak terlihat sama sekali sebagai tempat pembuangan sampah. Tidak ada bak sampah atau bangunan



Tempat sampah siluman di Kota Bekasi



Biasanya warga yang buang sampah di lahan kosong dilakukan malam hari. Mereka biasa buang dengan kendaraan bermotor.

kecil yang biasa dipakai untuk TPS.

Menurut penuturan Zakariya (48), salah satu warga yang tinggal tidak jauh dari TPS siluman tersebut, sampah itu sengaja dibuang warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi tersebut. Selama ini sampah di TPS siluman tersebut dibiarkan begitu saja tanpa ada pengelolaan dari pihak petugas dinas kebersihan Pemkot ataupun wilayah tersebut. Akibatnya, sampah yang menumpuk cukup mengganggu warga yang tinggal dekat lokasi TPS Siluman. “Biasanya warga yang buang sampah di lahan kosong dilakukan malam hari. Mereka biasa buang sambil berkendara motor. Mereka sebenarnya juga warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi,

sebab tidak mungkin orang bawa-bawa sampah dari rumah mereka yang jauh,” ujar Zakaria kepada PERCIK.

Berbeda dengan di Jl Kedondong, seorang warga bernama Ukie (62 tahun) di Beji Depok merelakan kebun miliknya menjadi tempat pembuangan sampah warga. Hal ini dilakukan karena belum ada petugas yang menyediakan tempat dan mengambil sampah di wilayah tersebut. “Sampah yang ada di kebun, kemudian saya bakar sendiri agar tidak menumpuk terlalu banyak,” ujar Ukie yang juga merupakan tokoh masyarakat setempat.

Ukie tidak mengenakan biaya kepada orang yang buang sampah. Dia membakarnya pun dengan sukarela. Sebagian sampah yang diangkut masih

bisa bermanfaat, dia kumpulkan untuk dijual ke pengepul. Cara membakar sampah seperti yang dilakukan Ukie sebenarnya tidak baik untuk lingkungan, namun Ukie merasa sampai saat ini dia tidak merasa ada masalah dari pembakaran sampah tersebut. “Saya kira bakar sampah sudah biasa dilakukan sejak dahulu, sehingga jika dilakukan sekarang pun juga tidak ada masalah. Sampah juga terpaksa dibakar, karena memang tidak ada petugas yang mengambilnya,” ujar Ukie kepada PERCIK.

Jika di dua TPS siluman ini tidak ada petugas yang mengambil sampah, berbeda dengan TPS siluman yang berada di dekat TPU Kaliabang Kota Bekasi, yang sampahnya diangkut petugas secara berkala. TPS siluman ini sebenarnya bukanlah sebuah lahan yang benar-benar kosong. Tapi berada di samping tembok yang berdekatan dengan jalan raya. Setiap hari warga banyak yang membuang sampah yang sudah dibungkus plastik di tempat tersebut. Orang yang membuang sampah adalah pengguna kendaraan bermotor di jalan Kaliabang, khususnya yang berkendara motor. “Entah siapa yang memulai buang sampah di sini, namun sekarang hal tersebut sudah menjadi kebiasaan,” ujar Rudi yang biasa menggunakan jalan ini saat ditemui PERCIK.

Memang ada petugas sampah yang mengambilnya secara berkala. Namun pengangkutan sampah oleh petugas ini merupakan sebuah dilema. Jika diangkut secara berkala secara tidak langsung

warga menganggap bahwa TPS siluman ini legal. Tapi jika tidak diangkut, sampah akan terus menumpuk dan tidak terkendali.

Masalah TPS Siluman tidak hanya terjadi di kota-kota penyangga Ibukota, di Jakarta pun juga mengalami hal yang sama. Kepala UPT Smart City, Setiaji menuturkan, pernah pada setiap bulan, laporan tentang sampah di Kelurahan Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara yang masuk setiap bulannya sampai ratusan laporan. Hal ini terjadi berbulan-bulan. Dia kemudian menganalisa kenapa laporan yang sangat banyak tentang sampah di satu kelurahan ini. "Akhirnya kita deteksi apa sih permasalahan di sana sebenarnya. Ternyata memang tidak banyak tempat sampah. Sementara truk sampah hanya sekali ke kelurahan tersebut, serta tidak melewati lokasi-lokasi tadi (TPS siluman)," ujar

Setiadi kepada PERCIK.

Guna merespon laporan tentang adanya TPS Siluman, petugas jika memungkinkan akan membuat tempat sampah di lokasi tersebut. Namun jika tidak memungkinkan (karena lahan bukan milik pemerintah), maka hanya akan diberikan tulisan "Dilarang Buang Sampah Di Sini".

Masalah buang sampah sembarangan tidak hanya membuat pemerintah daerah setempat berpikir lebih keras untuk menyelesaikannya, namun banyak masyarakat, khususnya yang tinggal bersebelahan dengan TPS siluman menjadi marah. Kondisi ini berpotensi melahirkan konflik horisontal antara pembuang sampah sembarangan dengan pemilik lahan atau warga yang tinggal di TPS Siluman. Tidak jarang ditemukan peringatan dengan nada mengancam

atau kata-kata kasar untuk memperingati orang untuk tidak buang sampah di wilayah mereka. Ada juga yang memberi peringatan dengan kata-kata simpatik dan menyindir serta tidak menyela.

Warga Punya Inisiatif Sendiri

Masalah proses pembuangan sampah sudah dipikirkan oleh pengurus lingkungan di tingkat warga. Mereka biasanya memberdayakan warga setempat untuk mengangkut sampah ke tempat pembuangan sampah sementara yang ada di dekat permukiman mereka. Hal ini misalnya terlihat pada pengelolaan sampah di RW 013 Kelurahan Bintara, Bekasi Barat, Kota Bekasi.

Di permukiman yang cukup padat ini, masyarakat cukup meletakkan sampah di depan rumah. Umumnya



**Petugas sampah
di Jakarta**

FOTO: DIVADEMANTA

Contoh peringatan yang dibuat warga agar tidak ada orang buang sampah sembarangan.

**Ya Allah
Aku Rela Miskin 7 Turunan
Kalau Buang Sampah
Di Sepanjang Jalan Ini.**

FOTO: FOTOLOKASI.COM



Dalam alur pembuangan sampah, peran tukang sangat strategis. Tanpa peran mereka, sampah akan menumpuk di rumah atau dibuang di tempat pembuangan sampah siluman.

jasa pengangkut sampah RW, wajib membayar Rp25 ribu setiap bulannya. Dana tersebut nantinya akan dibagikan kepada petugas sampah. “Dana yang dibayar warga akan dipergunakan untuk membayar petugas yang mengangkut sampah. Karena mereka memang tidak digaji oleh kelurahan atau kecamatan,”

mereka menggunakan plastik yang digantungkan di pagar. Menurut Agus, salah satu petugas pengangkut sampah di wilayah tersebut, dia sengaja meminta masyarakat membungkus sampah dengan plastik dan ditaruh di depan rumah. Mengambil sampah dari tempat sampah menurutnya membutuhkan waktu dan tenaga lebih banyak. Dalam mengangkut sampah, dia selalu ditemani satu orang. Mereka berbagi tugas, satu orang mendorong gerobak, dan satu lagi mengambil tempat sampah di depan rumah warga.

Kadang mereka mengangkat sampah di pagi atau sore hari, tergantung waktu kosong yang mereka miliki. “Selain sebagai petugas sampah, kami juga mempunyai pekerjaan lain. Sampah dari rumah-rumah warga kami angkut ke sebuah lahan kosong yang ada di Jalan Bintara Raya. Di sana nanti ada petugas dari pemerintah kota yang mengambilnya untuk diangkut ke TPA,” ujar Agus yang juga merupakan warga RW 13 Bintara.

Menurut Supriadi, Ketua RT 02/13 Kelurahan Bintara, setiap warga yang menggunakan

FOTO: SYIFA FAUZIAH



ujar Supriadi, kepada Majalah PERCIK.

Pola pengangkutan sampah yang mengkolaborasikan antara petugas sampah tingkat RW, hingga pemerintah kota ini juga di Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji, Kota Depok. Namin, Ketua RT 05/01 menyebutkan bahwa pengangkutan sampah dilakukan setiap hari agar tidak ada penumpukan sampah. Jika sampah menumpuk melebihi satu hari pasti meninggalkan bau. Seentara itu menurut Bambang (52), salah satu tukang sampah yang biasa mengambil sampah di wilayah RT 05/01, dia sudah memprediksi berapa volume sampah yang akan diangkut setiap harinya. Dia setiap pagi mengangkut sampah dari rumah ke rumah, kemudian sampah tersebut dibawa ke penampungan sampah yang disiapkan kelurahan sebelum diangkut oleh truk ke TPA

Cipayung Kota Depok. Jika ada waktu, Bambang dan temannya terlebih dahulu penyortiran sampah sebelum membuangnya.

Berbeda dengan dua wilayah tadi yang menggunakan jasa masyarakat setempat untuk mengangkut sampah ke TPS, di Cluster Alamanda Desa Karang Satria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, pengangkutan sampah dari rumah dilakukan oleh pihak ketiga yang berasal dari luar perumahan. “Biasanya truk pengangkut sampah datang dua kali atau tiga kali dalam seminggu. Mereka bukan dari petugas kebersihan pemerintah, namun pihak swasta yang bekerja sama dengan perumahan. Menurut petugas sampah yang datang tersebut, mereka membuat sampah ke TPS yang disediakan pemerintah kabupaten, tidak langsung ke TPA,” ujar Joko Anwar, salah satu warga setempat.

Pola pengangkutan sampah dari rumah, lalu dikumpulkan tempat penampungan sementara di setiap kelurahan ini tidak hanya lazim terlihat di kota-kota penyangga Jakarta, tapi juga di Ibukota. Di sejumlah tempat mudah ditemukan tempat penampungan sementara. Baik itu yang dilengkapi dengan bangunan tembok berbentuk kubus, atau yang memang dibiarkan di lahan kosong. TPS walaupun tidak sepanjang hari dipenuhi sampah, biasanya tetap meninggalkan bau. Terutama saat sampah belum diangkut oleh petugas tingkat provinsi.

Dalam alur pembuangan sampah, terlihat bahwa tukang sampah mempunyai peran strategis dalam menanggulangi masalah lingkungan. Tanpa peran mereka, sampah akan menumpuk di rumah atau dibuang di tempat pembuangan sampah siluman.

■ SYIFA FAUZIAH



Tempat sampah siluman di Kota Depok

Jakarta Smart City, Mengurai Permasalahan Ibukota

Para karyawan memantau laporan warga di kantor Jakarta Smart City

Indikator keberhasilan Jakarta Smart City (JSC) dalam mewujudkan Jakarta lebih “pintar” tidak hanya bisa dilihat dari kecanggihan teknologi yang dipergunakan, namun sejauh mana partisipasi masyarakat untuk berkontribusi. Apalagi kerja-kerja JMC selama ini ditopang oleh laporan warga kota yang harus direspon oleh aparat terkait.

Sejak berdirinya JSC pada Desember 2014 lalu, partisipasi

warga semakin meningkat. Respon aparat pun semakin cepat. Jika pada awal berdirinya, rata-rata respon pemerintah DKI Jakarta terhadap laporan warga membutuhkan waktu hingga 210 jam, kini mereka mampu melakukannya hanya dalam 15 jam. Sebuah kemajuan yang menggembirakan bukan ?

Pada 13 Oktober lalu, Majalah Percik berkesempatan untuk mewawancarai Setiaji, Kepala Unit Pelaksana Teknis

(UPT) Jakarta Smart City di kantornya yang terletak di kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Merdeka Selatan. Dalam kesempatan itu, Setiaji menjelaskan berbagai hal tentang JMC, mulai misi yang diusung, pengelolaan JMC, sistem kerja yang dilakukan, hingga target yang hendak dicapai dalam jangka menengah dan panjang. Berikut wawancara Percik dengan Setiaji di ruang kantornya:



FOTO: JAKARTA SMART CITY

Apa tujuan dibentuknya JMC di Ibukota?

Sekarang platform *smart city* bukan hanya di Jakarta, namun juga di kota lain. *Smart city* ini bertujuan mendorong kota menjadi lebih “cerdas”. Prinsip pijakan *smart city* adalah untuk mengatasi berbagai problem di perkotaan, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan masalah urban dan sebagainya. Sebagaimana kita ketahui semakin tingginya orang ingin tinggal di perkotaan diikuti berbagai macam problem seperti sampah lingkungan, kemacetan, keamanan dan sebagainya.

Selama ini problem-problem itu diselesaikan dengan cara-cara yang konvensional. Kami melihat cara konvensional tersebut tidak cukup, perlu kolaborasi dengan cara yang

berbasis teknologi, sehingga semua problem dapat diatasi dengan lebih cepat, lebih efisien, dan tentunya lebih efektif. Prinsip dasarnya, ya kita ingin memonitor semua problem tadi dengan lebih cepat, kemudian kita deteksi dan kita kendalikan.

Selama ini, aspek apa saja yang menjadi perhatian JMC ?

Ada enam hal yang kami perhatikan selama ini. Pertama adalah lingkungan (*environment*), fokus kita adalah bagaimana lingkungan kita lebih baik, polusi berkurang, terciptanya *green building* dan lainnya. Kita mempunyai program yaitu pada 2030 akan mengurangi konsumsi energi dan mengurangi polusi serta penggunaan air.

Kedua adalah pergerakan (*mobility*) orang dan kendaraan yang selama ini masih sangat lambat. Kemacetan menjadi kendala kita saat ini. Waktu tempuh (*traveling time*) dari Barat ke Timur mencapai 2 jam atau lebih. Pada 2025 kita harapkan waktu tempuh itu maksimal 75 menit dengan



FOTO: ISLAHUDDIN

menggunakan transportasi publik. Ketiga adalah ekonomi. Kami harapkan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) bisa lebih meningkatkan kapasitasnya. Kita lakukan digitalisasi, mulai dari e-commerce dan lainnya, sehingga kemampuan mereka meningkat.

Keempat, dari sisi pemerintah yaitu menarapkan e-government dan meningkatkan transparansi. Kami tidak bisa mengharapkan keadaan dan masyarakat berubah, jika dari sisi pemerintah sendiri belum berubah. Kelima adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat yaitu bagaimana lingkungan lebih aman dan nyaman. Kita pasang banyak CCTV dan melengkapi fasilitas yang ada. Terakhir sektor masyarakat (people), yaitu mereka bisa mengakses semua fasilitas yang ada seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan. Kita memberikan layanan kepada masyarakat kurang mampu dengan juga berbasis teknologi.

Dari enam hal tersebut, manakah yang menjadi perhatian pertama dari JMC ?

Fokus utama kita adalah



Fokus utama kita adalah sisi goverment. Kita mendorong untuk mengubah birokrasi kita yang lambat dan tertutup menjadi lebih transparan dan melibatkan masyarakat dalam semua prosesnya, seperti proses penganggaran.

sisi government. Kita mendorong untuk mengubah birokrasi kita yang lambat dan tertutup menjadi lebih transparan dan melibatkan masyarakat dalam semua prosesnya, seperti proses penganggaran. Kita harus menjadi lebih terbuka dan responsif. Ini penting sebab kalau kita tidak bergerak atau lambat, percuma orang melapor tapi tidak direspon. Perbaikan lingkungan juga mendapat perhatian besar seperti terkait banjir dan persampahan.

Apa ada konsep smart city dari luar negeri yang menjadi rujukan JMC ?

Konsep smart city di Jakarta saat ini berbasis

komplain. Berbeda dengan di luar negeri yang umumnya menggunakan media sosial seperti Facebook dan lainnya. Sehingga refrensinya tentang hal ini tidak banyak di luar negeri. Di Singapura misalnya mereka mempunyai banyak CCTV. Sementara kita yang tidak mempunyai banyak CCTV, lebih mengandalkan gerakan masyarakat untuk “menjadi CCTV” kita. Kalau dulu Pak Jokowi mengadakan blusukan, maka kami ada e-blusukan untuk mengetahui masalah di lapangan.

Sementara itu dari sisi problem lingkungan dan transportasi kita banyak referensi di negara lain seperti Singapura, Barcelona (Spanyol), dan Amsterdam (Belanda).

Selama ini bagaimana respon masyarakat terhadap JMC ?

Tren di Jakarta sendiri adalah masyarakat bisa langsung lapor melalui aplikasi. Kita bisa memonitor dan mengetahui problem yang bisa langsung menangani secara lebih tepat. Biasanya yang paling banyak dilaporkan adalah masalah

FOTO: JAKARTA SMART CITY





FOTO: ISLAHUDDIN

sampah dan kemacetan, kemudian pelanggaran. Macam-macam pelanggaran mulai dari orang buang sampah sembarangan, melanggar lalu lintas dan sebagainya

Seberapa cepat respon JMC atas laporan masyarakat ?

JMC baru mulai pertengahan Desember 2014. Grafik kita menunjukkan bahwa respon pemerintah dan partisipasi masyarakat semakin meningkat. Masyarakat makin peduli untuk kolaborasi dengan pemerintah. Peningkatan kontribusi masyarakat ini juga disebabkan peningkatan kecepatan respon petugas-petugas kita di lapangan.

Awalnya, rata-rata kecepatan repon petugas kita sekitar 250 jam untuk semua kategori. Tapi sekarang jauh lebih cepat menjadi sekitar 15 jam rata-rata. Terkait masalah sampah, hal

yang paling banyak dilaporkan adalah perilaku buang sampah sembarangan dan juga sampah yang tidak terangkut dan sampah di parit-parit.

Apakah perilaku buang sampah sembarang itu melahirkan TPS siluman ?

Kemarin kita pernah analisa permasalahan di Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. Dari ratusan laporan yang masuk, masalah utamanya adalah sampah. Akhirnya kita deteksi apa sih penyebab permasalahan di sana sebenarnya. Ternyata memang tidak banyak tempat pembuangan sampah yang tersedia, dan truk kita di situ ternyata hanya lewat sehari sekali serta tidak melewati lokasi-lokasi tadi (TPS siluman). Tempat timbunan sampah menjadi banyak. Makanya dengan adanya *smart city* kita

bisa mendeteksi hal itu

Bagaimana respon petugas atas adanya sampah siluman ini ?

Ya kita harus cek dulu kondisi di sana seperti apa. Kita bisa taruh atau buat tempat pembuangan sampah. Jika tidak bisa, ya paling kita buat tulisan dilarang buang sampah di sana.

Selama ini pola koordinasi JMC dengan petugas hingga tingkat kelurahan seperti apa ?

Notifikasi laporan otomatis bisa langsung sampai ke Lurah, sehingga mereka bisa langsung meresponnya. Para lurah adalah *chief manager* yang harus paham wilayahnya, sehingga setiap laporan yang langsung masuk dalam notifikasi ke *handphon* Pak Lurah. Dalam aplikasi yang ada di *handphone* Pak Lurah, sudah ada pilihan apakah harus koordinasi dengan



Suasana Jakarta Smart City



Dalam aplikasi yang ada di handphone Pak Lurah, sudah ada pilihan apakah harus koordinasi atau tangani langsung.

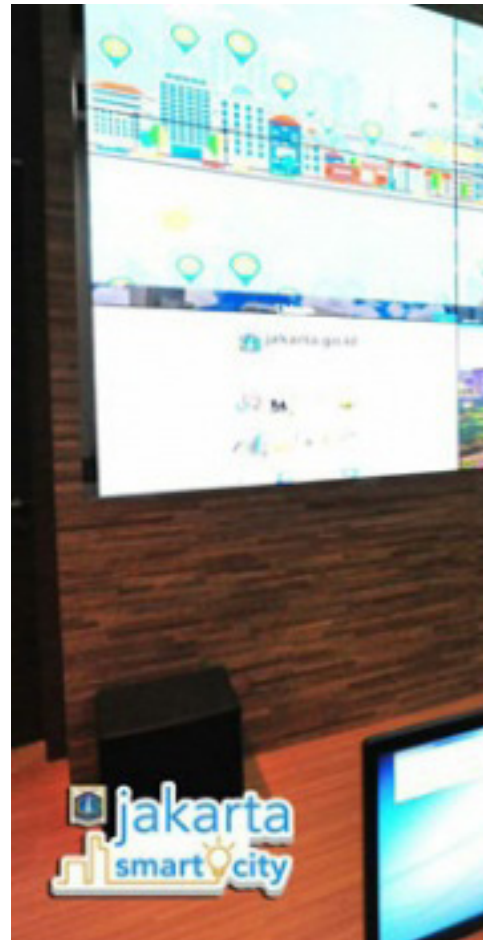
unit terkait atau menanganinya langsung.

Beberapa kewenangan memang sudah diberikan kepada Pak Lurah, seperti penanganan sampah. Apalagi sekarang ada PPSU (Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum) yang ada di setiap kelurahan. Sementara itu masalah lain seperti kemacetan, penanganan pedagang kaki lima, dan lainnya, mereka bisa berkordinasi melalui *handphone* ke unit terkait untuk

menyelesaikannya.

Kalau dari sisi teknologi, apakah teknologi yang dimiliki sudah cukup memuaskan ?

Selama ini laporan masyarakat tidak datang dari satu sumber atau channel. mempunyai 7 *channel*, seperti Qlue, lapor.go.id, SMS, Facebook. Kita sedang mengintegrasikan semua saluran tersebut, sehingga bisa mengoptimalkan semua laporan yang ada. Selain itu, integrasi saluran ini akan



memudahkan SKPD dalam merespon laporan yang ada. Integrasi itu akan terwujud dalam bentuk CRM (*Citizen Relationship Management*) sebagai platform untuk merespon berbagai aspirasi warga yang akan diluncurkan akhir tahun ini.

Kita mempunyai target menengah yaitu pada 2018 mengintegrasikan seluruh data dan bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Pembentukan platform dilakukan secara bertahap mulai dari integrasi dan standarisasi agar terkoneksi dengan yang lain. Sementara itu untuk merespon makin banyaknya

data yang masih, kami mulai beralih menggunakan *big data* (teknologi manajemen aset informasi dengan volume tinggi, kecepatan tinggi dan kompleks). Data yang banyak itu akan diolah dan dimanfaatkan untuk mendukung e-government seperti membuat aplikasi perizinan secara *online* dan lainnya.

Namun mewujudkan Jakarta sebagai smart city tidak hanya bisa dilakukan dengan cara membuat aplikasi, perlu juga upaya lain yang terintegrasi dan terkolaborasi seperti penurunan *traveling time* yang membutuhkan program pembangunan infrastruktur

dalam jangka panjang.

Jadi pembangunan yang dilakukan saat ini dan masa mendatang sudah harus terkoordinasi dengan konsep smart city?

Ya, kita memang memberikan semacam rekomendasi dan kebijakan kepada sejumlah instansi. Misalnya ke Trans Jakarta kita bisa beri masukan tentang koridor mana yang rata-rata kecepatannya terbatas. Mereka menerima masukan dari kita karena memang bisa mendukung program yang mereka lakukan.

■ ISLAHUDDIN



Karyawan Jakarta Smart City memonitor laporan warga

FOTO: JAKARTA SMART CITY

In memoriam
Nugroho Tri Utomo
 11 Juni 1962 - 24 Juni 2016



Seniman Pembangunan Air Minum dan Sanitasi

Dedikasi, sumbangan, dan komitmen Nugroho Tri Utomo dalam mengawal target 100-0-100 tercatat dalam tinta sejarah dan diakui oleh para *stakeholder* di bidang pembangunan air minum dan sanitasi

Suasana haru terlihat sangat jelas saat Syarif Puradimadja (76 tahun), Senior Advisor USDP, menyampaikan doa dalam acara “Air Untuk Semua” yang diadakan oleh Jejaring AMPL pada 26 Oktober 2016 di XXI Epicentrum Jakarta Selatan. Dalam doanya, secara khusus Syarif mengenang sosok Nugroho Tri Utomo yang meninggal pada 24 Juni 2016. “Pak Nugroho merupakan sosok yang tidak dipisahkan dengan pembangunan air minum dan

sanitasi dalam lebih 10 tahun terakhir,” kata Syarif sambil terbata-bata.

Syarif mengaku sudah lama kenal dengan Pak Nug, begitu mantan Direktur Perkotaan, Permukiman dan Perumahan Bappenas, itu biasa disapa. Seingat Syarif, dia sudah mengenal Pak Nug sejak tahun 1994. Kala itu, Syarif membantu program yang terkait air minum dan sanitasi di Kementerian Dalam Negeri. “Saat itu usia Pak Nug muda masih sebagai staf biasa, namun kemampuannya

sudah menonjol. Beliau adalah birokrat yang sangat profesional. Dia sudah biasa berkoordinasi dengan banyak instansi,” cerita Syarif kepada Majalah PERCIK.

Sejak saat itu, walaupun berpindah-pindah instansi mulai dari Bank Dunia hingga saat ini di USDP, Syarif mengaku selalu berhubungan dengan Pak Nug. Dari sisi usia, Pak Nug masih lebih muda 22 tahun, namun syarif tidak canggung untuk menjadikannya sebagai seorang pemimpin di bidang pembangunan AMPL. Syarif

melihat Pak Nug sebagai sosok yang sangat akomodatif. Bisa menerima siapa saja dengan tangan dan hati terbuka tanpa ada pretensi apapun, apalagi pretensi negatif. Pemikirannya sangat positif. Tidak pernah secara langsung mengatakan penolakan atas suatu ide. “Meskipun saya lebih tua, saya anggap beliau pemimpin saya, apalagi saya adalah konsultan. Jadi saya ikuti arahan, petunjuk dan pola kerja birokrasinya,” tambah Syarif.

Gaya komunikasi Pak Nug yang sangat cair juga dirasakan oleh Wiwit Heris Mandari, Managing Director SPEAK Indonesia. Wiwit mengaku sudah berinteraksi dengan Pak Nug sejak 2004, saat dia aktif di Waspola. Wiwit melihat Pak Nug tidak semata-mata menempatkan diri sebagai pejabat, tetapi juga sebagai teman. Wawasan dan jiwa seni yang mengalir pada dirinya membuat Pak Nug mudah bergaul. Dia juga mempunyai ide-ide yang luar biasa. “Pak Nugroho membantu LSM untuk lebih kreatif mengembangkan program-program pembangunan air minum dan sanitasi. Semua kegiatan dan program kita, seperti *workshop*, jika ada Pak Nugroho pasti selalu lebih cair. Beliau tidak memosisikan diri sebagai birokrat yang berhadapan dengan pelaku usaha, namun sebagai teman,” kenang Wiwit saat bercerita kepada PERCIK

Satu hal yang sangat diingatkannya Wiwit dari sosok Pak Nug adalah idenya yang *out of the box*. Saat menghadapi masalah dalam pembangunan, Pak Nug selalu menekankan agar tidak hanya

berkatut pada kotak masalah namun harus berpikir di luarnya. Wiwit juga mengenang Pak Nug sebagai sosok yang memberikan perhatian besar pada kolaborasi antara strategi pembangunan *top down* dan *bottom up*. Pak Nug juga menempatkan strategi komunikasi dan advokasi dalam perencanaan pembangunan.

“Saat pertama kali memulai PPSP (Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman), Pak Nugroho menyampaikan perlunya merubah paradigma. Strategi sanitasi ke depan adalah *top down* dan *bottom up*. Sebab

yang terpaku ketika Pak Nug memaparkan tentang sesuatu di depan kamera, termasuk saat mendorong akses universal pembangunan air minum dan sanitasi. “Dia menguasai strategi sanitasi yang lebih baik. Sehingga LSM pun terpaku untuk memperbaiki strategi komunikasi mereka. Dan para LSM pun tambah yakin sebenarnya tidak perlu berseberangan dengan pemerintah,” jelas Wiwit.

Pak Nug menekankan agar semua pihak bisa saling bekerja sama. Salah satunya adalah dengan cara memaksimalkan



Pak Nugroho adalah sosok yang sangat akomodatif. Bisa menerima siapa saja dengan tangan dan hati terbuka tanpa ada pretensi apapun, apalagi pretensi negatif. Pemikirannya sangat positif.

pembangunan yang *top down* jika tidak bertemu dengan *bottom up* itu adalah mustahil dan sia-sia. Sehingga semua perencanaan sanitasi itu harus melalui proses *bottom up*. Sehingga saya melihat PPSP melakukan suatu survei dan pendekatan kepada semua komponen dan memasukkan unsur strategi komunikasi dan advokasi. Bagi saya ini luar biasa,” tambah Wiwit.

Pak Nug, menurut Wiwit, juga pandai mengemas (*packaging*) suatu isu menjadi lebih menarik, bahkan lebih ke arah *entertain*. Banyak orang

keberadaan Pokja AMPL di setiap daerah. Pihak swasta atau LSM saat masuk ke suatu daerah diminta untuk selalu berhubungan dengan Pokja AMPL setempat agar koordinasi pembangunan bisa lebih terintegrasi.

Kesan mendalam juga disampaikan Oswar Mungkasa. Deputi Gubernur DKI Jakarta, Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup ini sebelumnya lama bekerja sama dengan Pak Nug di Pokja AMPL Nasional dan Bappenas RI. Oswar mengaku sangat nyaman bekerja dengan Pak Nug dan



mereka bisa saling mengisi. "Beliau sangat menguasai bidang teknologi, karena latar belakang beliau adalah teknik lingkungan sementara saya bukan. Saya sudah beberapa tahun lalu meninggalkan dunia air minum sementara beliau masih di sana. Dengan kematangan, *leadership* yang dimiliki beliau, sangat membantu pembangunan air minum dan sanitasi," ujar Oswar.

Salah satu sumbangan besar Pak Nug dalam pembangunan air minum dan sanitasi adalah terbentuknya Akkopsi (Asosiasi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi). Direktur Eksekutif Akkopsi,



Saat pertama kali memulai PPSP, Pak Nugroho menyampaikan perlunya merubah paradigma. Strategi sanitasi ke depan adalah top down dan bottom up. Sebab pembangunan yang top down jika tidak bertemu dengan bottom up itu adalah mustahil dan sia-sia.



Almarhum Nugroho Tri Utomo bersama Kepala Daerah yang mendapatkan AMPL Award 2015.

Josrizal Zein mengakui peran besar Pak Nug dalam pendirian Akkopsi. Sebelum berdirinya Akkopsi, Pak Nug berhasil meyakinkan kepala daerah tentang betapa pentingnya sebuah wadah pembangunan air minum dan sanitasi. "Maka timbullah keinginan dari kepala daerah, termasuk saya, Pak Syaiful Djarot (Wakil Gubernur DKI Jakarta yang saat itu menjabat sebagai Bupati Blitar) dan Pak Joko Widodo (Saat menjabat sebagai Walikota Solo), Pak Puspayoga (saat masih menjabat sebagai Walikota Denpasar) dan sejumlah kepala daerah lain untuk mendirikan

asosiasi dari bawah," ujar Josrizal.

Menurut Josrizal, Pak Nug mampu memberdayakan semua potensi yang ada, baik potensi pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat. Peran masyarakat memang penting dalam kemajuan pembangunan AMPL. "Beliau layaknya seorang manajer handal yang mampu memberdayakan semua potensi yang ada," tambah Josrizal.

Menekankan Adanya Ownership

Sejumlah program berhasil digagas dan dikawal dengan baik oleh Pak Nug. Diantaranya adalah *Indonesia*

Sanitation Sector Development Program (ISSDP) yang dimulai sejak 2006. ISSDP berhasil mengubah *mindset* banyak pihak akan pentingnya air limbah, persampahan, dan drainase atau yang biasa disebut sanitasi lingkungan. Saat Konferensi Sanitasi Nasional (KSAN) ke-2 pada 2009, secara khusus Boediono yang kala itu menjabat sebagai Wakil Presiden memberi apresiasi pada program ini.

ISSDP kemudian resmi menjadi program nasional dengan nama Program Percepatan Sanitasi Perkotaan Permukiman (PPSP) pada 2010. PPSP adalah platform pembangunan sanitasi yang menekankan adanya *ownership* dari pemerintah daerah sebagai *enabler* pembangunan sanitasi di daerah. PPSP ini membuat kebijakan menjadi efektif dan terkoordinasi. PPSP tidak hanya meningkatkan kesadaran akan pentingnya sanitasi melalui perbaikan perencanaan sanitasi, tetapi ini juga mereformasi kelembagaan dan membuat perencanaan strategis dan meningkatkan kesadaran pentingnya sanitasi. Program ini memberi penekanan pada kolaborasi antara pemerintah dan lembaga non-pemerintah. pada 2015 sudah ada 465 kab/kota yang sudah memiliki SSK. Pencapaian ini menjadi salah satu pijakan modal utama untuk mencapai akses universal air minum dan sanitasi.

Keberhasilan PPSP menurut M. Sjukrul Amien, mantan

Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) Ditjen Cipta Karya, tidak lepas dari strategi yang dilakukan Pak Nug. "Beliau adalah sahabat saya yang mempunyai komitmen yang besar dalam pembangunan air minum dan sanitasi. Pak Nugroho mampu melahirkan dan memastikan sebuah program seperti PPSP bisa berjalan dengan baik," ujar

Sjukrul.

Penilaian tentang peran besar Pak Nug dalam pembangunan air minum dan sanitasi juga disampaikan Budi Yuwono (Ketua Umum Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik lingkungan Indonesia), dan mantan menteri PPN, Sofyan A. Djalil. Sebagaimana ditulis dalam buku *Travelling On the Jet Plane*, keduanya menyampaikan bahkan Pak

Nug adalah sosok pekerja keras. Semua upaya yang dilakukan Pak Nug, termasuk mengkolaborasi semua potensi yang ada, telah melahirkan harmonisasi dalam pembangunan AMPL. Harmonisasi ini menjadi jalan mulus untuk mencapai akses universal di bidang air minum dan sanitasi yang sudah dicanangkan pemerintah.

■ SYIFA FAUZIAH

Masih lekat dalam ingatan kami, berbagai ide segar, inovatif dan *out-of-the-box* yang almarhum sampaikan saat menjabat Wakil Ketua Umum IATPI

Budi Yuwono
Ketua Umum Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik lingkungan Indonesia (IATPI) dan Mantan Dirjen Cipta Karya



Almarhum yang saya kenal merupakan salah satu andalan Bappenas yang inovatif, pekerja keras, dan sangat efektif dalam mengkoordinasikan *stakeholdersnya*. Banyak tugas yang dilaksanakan almarhum dapat diselesaikan dengan sangat memuaskan.

Sofyan A. Djalil
Mantan Menteri PPN/ Kepala Bappenas



Sebelum Akkopsi berdiri, Pak Nugroho berhasil meyakinkan para kepala daerah untuk mendirikan suatu wadah atau organisasi untuk lebih meningkatkan pembangunan air minum dan sanitasi.

Josrizal Zain, Ketua Akkopsi dan Mantan Walikota Payakumbuh Sumatera Barat



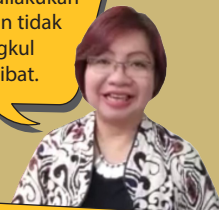
Sifat koordinatifnya sangat menonjol. Dia baik saat berkomunikasi ke atas dan berkoordinasi ke samping, serta mampu memberikan petunjuk yang positif ke bawah.

Syarif Puradimadja,
Senior Advisor USDP



Beliau memberikan terobosan dalam hal advokasi dan komunikasi pembangunan air minum dan sanitasi. Pendekatan yang dilakukan Pak Nugroho sangat cair dan tidak kaku. Sehingga bisa merangkul banyak kalangan untuk terlibat.

Wiwit Heris Mandiri,
Managing Director
SPEAK Indonesia



Saya merasa sangat nyaman bekerja sama dan duet dengan Pak Nug. Kami saling mengisi, saya bukan dari teknik lingkungan sementara beliau dari teknik lingkungan. Saya sangat kehilangan atas wafatnya Pak Nugroho.

Oswar Mungkasa
Deputi Gubernur DKI Jakarta dan mantan Ketua Jejaring AMPL



Beliau adalah sahabat saya yang mempunyai komitmen yang besar dalam pembangunan air minum dan sanitasi. Pak Nugroho mampu melahirkan dan memastikan sebuah program seperti PPSP bisa berjalan dengan baik.

M. Sjukrul Amien, Mantan Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) Ditjen Cipta Karya





Kota Milton Keynes dilihat dari udara.

FOTO: INDEPENDENT

Kota Milton Keynes, Tempat Tinggal Impian

Pemerintah Kota Milton Keynes (MK) dengan bangga memperkenalkan *tagline* “When you know Milton Keynes, You will love Milton Keynes” kepada masyarakat dunia. Pemerintah setempat yakin, keindahan yang lahir dari tata kota yang baik, kebersihan yang terjaga, serta kebiasaan dan budaya masyarakatnya yang teratur menjadikan Milton Keynes sebagai kota idaman

Bagi masyarakat Indonesia, Milton Keynes masih terdengar sangat asing. Hal ini wajar, mengingat salah satu kota di Inggris ini hanyalah sebuah kota kecil. Namanya tersembunyi dari

hingar bingar nama kota-kota besar Inggris seperti London, Manchester, Birmingham, Leeds, Liverpool, Oxford, Cambridge, Sheffield dan lainnya. Selain kecil, Milton Keynes termasuk kota baru. Ia baru dibangun pada tahun 1967. Berbeda dengan kota-kota besar Inggris lainnya yang sudah hadir berabad-abad silam.

Sebelum dibangun, Pemerintah Inggris benar-benar memikirkan secara matang konsep dan tatanan Milton Keynes. Mereka ingin menjadikan Milton Keynes sebagai sebuah kota yang bebas kemacetan, permukiman teratur, dan berbagai hal yang mendukung hadirnya

sebuah kota mandiri dengan berbagai fasilitas di dalamnya. Perencanaan kota ini dilakukan oleh Milton Keynes Development Corporation (MKDC).

Perencanaan meliputi semua aspek, mulai dari jaringan jalan, keberadaan ruang publik (danau dan taman), hingga bangunan-bangunan modern yang dibangun di kota. Tidak hanya infrastruktur fisik yang menjadi perhatian dalam membangun kota ini. Perilaku masyarakat juga mendapatkan perhatian penting. Semua fasilitas yang dirancang teratur itu harus dipergunakan masyarakat dengan disiplin. Misalnya, jalan-jalan di kota sudah terbagi

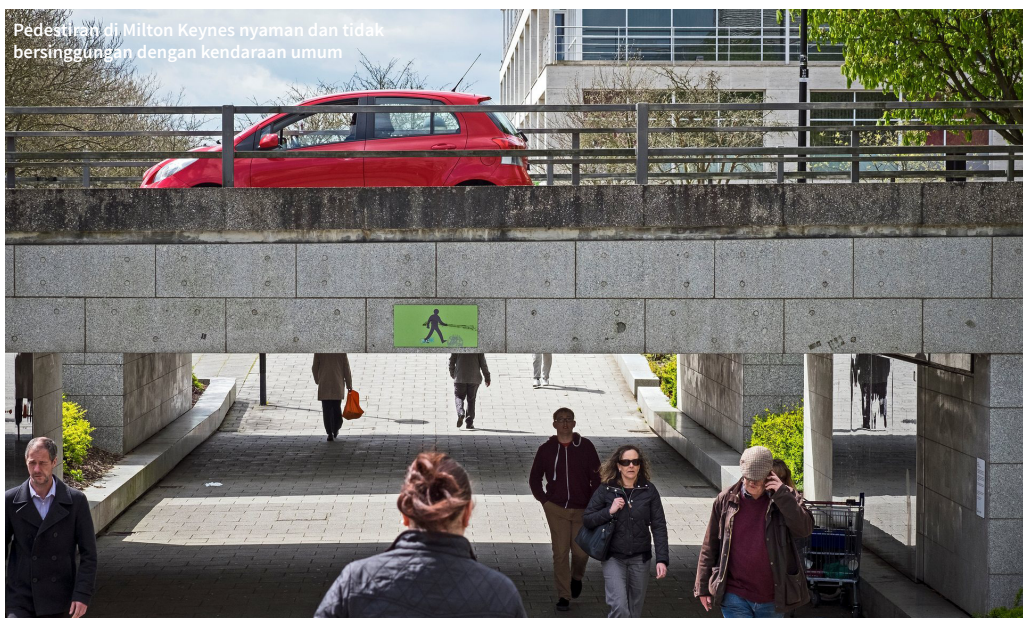


FOTO: DAVID SILLITOE

antara jalan untuk kendaraan bermotor dan untuk pejalan kaki. Berbeda dengan kota-kota di Indonesia, jalan khusus pejalan kaki di Milton Keynes sangat lebar dan nyaman, sehingga mereka tidak khawatir berdesakan di jalan. Jalan untuk pejalan kaki pun tidak langsung berada di pinggir jalanan umum yang dipergunakan kendaraan bermotor, sehingga mereka nyaman dan tidak khawatir akan tertabrak. Saat ingin menyeberang, pejalan kaki bisa menggunakan *underpass* khusus pejalan kaki, sehingga benar-benar tidak bersinggungan dengan kendaraan bermotor.

Walaupun begitu, bukan berarti kota ini bebas kecelakaan. Ada saja penduduk yang tidak disiplin, khususnya kalangan muda sebagaimana yang terlihat dalam video “Wrong Decision” yang dibuat Milton Keynes Council dan ditayangkan di YouTube. Pemerintah setempat selalu

“*Rata-rata setiap keluarga di kota tersebut mempunyai 1,75 sepeda. Sekitar 7% pekerja memilih jalan kaki ke tempat kerja mereka, sementara 3% menggunakan sepeda.*”

melakukan sosialisasi untuk semua pengguna jalan agar disiplin.

Masyarakat Milton Keynes

memang suka jalan kaki atau menggunakan sepeda. Tidak heran jika ada yang menyebut Milton Keynes sebagai *a city of cyclists* (kota bagi pesepeda), dan juga surga pejalan kaki. Menurut data Milton Keynes Council (2010), rata-rata setiap keluarga di kota tersebut mempunyai 1,75 sepeda. Sekitar 7% pekerja memilih jalan kaki ke tempat kerja mereka, sementara 3% menggunakan sepeda.

Ruang Terbuka Hijau

Penduduk Milton Keynes tidak hanya dimanjakan dengan sistem transportasi yang baik, mereka juga bisa menikmati ruang terbuka hijau yang mencapai 40% dari luas kota. Menurut laporan “*Milton Keynes a Sustainable Future a Low Carbon Prospectus* (2010)”, kota seluas 89 km² ini mempunyai lebih dari 22 juta pohon. Bandingkan dengan New York yang hanya mempunyai 5,2 juta pohon. Milton Keynes juga



Kota seluas 89 km² ini mempunyai lebih dari 22 juta pohon dan mempunyai lebih dari 1.800 hektar danau dan taman yang membuat kualitas udara paling baik di Eropa.

mempunyai lebih dari 1.800 hektar danau dan taman yang membuat kualitas udara paling baik di Eropa.

Mantan walikota Milton Keynes, Councillor Debbie Brock menyebutkan bahwa kota ini mempunyai lanskap

yang menyenangkan. Sejak awal kota memang dirancang ramah lingkungan. Dari sisi energi, Milton Keynes sudah memperkenalkan rumah bertenaga surya pada 1972, atau hanya beberapa tahun sejak kota ini dibangun. “Kami

mempunyai posisi yang kuat untuk mewujudkan tujuan tersebut (kota rendah karbon), dengan memiliki *outlook* fleksibel, pertumbuhan populasi, pertumbuhan ekonomi yang dinamis, dan serangkaian program yang terkoordinasi dengan baik serta menampilkan teknologi canggih dan mitra perintis,” ujar Debbie dalam laporan tersebut.

Dalam mewujudkan Milton Keynes sebagai kota rendah karbon, pemerintah setempat melibatkan semua pihak yang bekerja secara kolektif. Selain ada pihak pemerintah dan swasta (perusahaan), ada juga kelompok relawan, akademisi, dan tentu saja orang-orang yang tinggal dan bekerja di kota ini. “Prospektus ini membantu untuk menetapkan visi, di mana semua kelompok akan bekerja sama, sehingga kita bisa menghadapi tantangan perubahan iklim dan mengurangi jejak karbon Milton Keynes seperti pertumbuhan yang kita inginkan,” jelas Debbie.

Program rendah emisi karbon tidak hanya didukung oleh sistem transportasi dan besarnya ruang terbuka hijau, Milton Keynes juga mempunyai kebijakan yang mengatur pembangunan rumah. Pada tahun 1999, seluruh rumah yang dibangun di Milton Keynes harus hemat energi. Kebijakan ini membuat energi yang dipergunakan rumah di Milton Keynes lebih rendah 6-10% dari rata-rata rumah di Inggris.

Penataan lokasi permukiman pun sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelum kota ini dibangun. Perencanaan yang baik ini

FOTO: DAVID SILLITOE



Proses daur ulang sampah di pabrik pengolahan



Terminal Sepeda

FOTO: FALCO.CO.UK

membuat tata kota terlihat rapi dan teratur. Hal ini menghindari terjadinya kesemrawutan di kemudian hari.

Daur ulang sampah

Daur ulang sampah tidak hanya tugas Dinas Kebersihan setempat. Keterlibatan masyarakat sangat menentukan keberhasilan daur ulang sampah yang dilakukan di Milton Keynes. Dalam skema pengolahan sampah, peran rumah tangga sangat penting, karena semua sampah sudah mulai dipilah dari rumah.

Anggota rumah tangga

diwajibkan untuk memilah sampah yang akan dibuang. Ada 5 jenis kategori sampah rumah tangga yang harus diletakkan ditempat yang sudah ditentukan. Kelima tempat itu adalah tempat sampah hijau, plastik pink, kotak biru, kotak abu-abu, kantong khusus warna kuning, serta plastik hitam. Tempat sampah hijau dipergunakan untuk sampah organik seperti kulit buah, ranting, rumput, pohon dan lainnya. Sementara kotak abu-abu untuk berbagai sampah dapur seperti makanan terbuat dari susu, daging dan tulang, roti

dan kue-kue, ikan, serta teh dan kopi. Sampah-sampah ini bisa diolah untuk kompos

Sementara kantong kuning untuk baterai bekas; kotak biru untuk bekas botol kaca; tas pink untuk kertas, botol plastik, wadah makanan, foil, aluminum, dan aerosol. Sedangkan yang terakhir untuk wadah obat, *diapers*, dan lainnya yang mengandung bahan kimia. Para petugas sampah, mulai dari pengangkut sampah, hingga pemilah di pabrik akan memperlakukan sampah berdasarkan kategorinya.

Mereka bekerja dengan

teknologi canggih, sehingga mayoritas sampah akan bisa didaur ulang. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat kota.

■ SYIFA FAUZIAH



Saat diangkut, sampah langsung dipisahkan berdasarkan kategori





Rumah Cerdas Bikin Hidup Lebih Mudah dan Bergairah

Kemajuan teknologi yang melahirkan produk inovatif telah mengubah cara hidup manusia secara radikal. Banyak produk baru muncul untuk membuat kehidupan manusia lebih mudan dan nyaman.

Perubahan yang disajikan oleh kemajuan teknologi kini telah menyasar inti dari kehidupan manusia sehari-hari, yaitu kehidupan di rumah. Rumah pintar dengan berbagai fasilitas modern kini semakin dirindukan. Sejumlah negara, perusahaan *real-estate*, hingga perusahaan

teknologi pun berlomba-lomba dan berkolaborasi untuk merealisasikan *smart home*. *Smart home* dirancang untuk melahirkan solusi atas sejumlah masalah klasik di rumah seperti keamanan, penghematan energi, hingga penggunaan air yang seminim mungkin. Teknologi *smart home* tersebut semakin hari juga makin canggih dan kompleks.

Kecanggihan dihadirkan untuk memecahkan semua kebutuhan yang terus bertambah.

Penggunaan teknologi *smart home* misalnya bisa dilihat di Yahua, sebuah wilayah yang terletak di Jurong East, Singapura. Pemerintah setempat melalui Dewan Perumahan dan Permukiman (*The Housing & Development Board/HDB*) mendorong

MENJAGA LINGKUNGAN DAN MENGHEMAT BIAYA TAGIHAN

FOTO: SMART HDB HOME



- Monitor semua penggunaan energi dan air
- Mengatur target penggunaan energi dan air
- Menjaga penggunaan peralatan secara otomatis

- Memonitor penggunaan peralatan elektrik
- Mematikan peralatan elektronik secara otomatis

masyarakat menggunakan teknologi *smart home*. HBD menciptakan platform teknologi untuk meningkatkan kehidupan sehari-hari melalui *smart living*. Platform tersebut saat ini sudah dipergunakan di lebih 3.200 rumah tangga di Yahua.

Ada dua model platform yang kini sudah dipergunakan yaitu *The Utilities Management System* yang dapat membantu anggota keluarga memantau penggunaan energi dan air melalui aplikasi *mobile*.

Pengguna bisa mendapatkan info terbaru tentang penggunaan dan tagihan listrik serta air per minggu. Mereka juga bisa mengetahui kapan konsumsi energi melebihi target yang sudah ditentukan. Mereka bisa mematikan semua



Pada awalnya, di Oktober 2015, dua platform smart home HBD tersebut diujicobakan hanya untuk 10 rumah di Yahua, namun pada April 2016, sudah ribuan rumah tangga yang mempergunakannya

peralatan yang ada melalui aplikasi secara jarak jauh.

Platform lainnya adalah *The Elderly Monitoring System*. Platform ini bisa dipergunakan untuk memonitor dan membantu orang lanjut usia dalam melakukan aktivitas

di dalam rumah. Sehingga anak-anak dan pengasuh mereka tidak perlu khawatir dengan keselamatan orang tua. Misalnya, melalui bantuan sensor gerak, sistem akan mengirimkan peringatan ke ponsel pengasuh atau anak

MENGONTROL KEGIATAN LANSIA



FOTO: SMART HDB HOME

ketika mendeteksi ada gerakan yang sama dalam waktu lama. Gerakan yang berulang-ulang merupakan salah satu indikator yang menunjukkan lansia tersebut sedang mengalami masalah dan membutuhkan pertolongan.

Keberadaan lansia juga mudah terdeteksi, yaitu apakah ia berada di dapur, ruang keluarga dan lainnya. Karena semua sensor yang ada sudah terkoneksi dengan *smartphone* yang dimiliki pengasuh dan anak-anak mereka. Baik itu sensor gerakan tubuh, gerakan pintu, hingga alarm panik yang bisa langsung dikirimkan lansia melalui alat yang selalu mereka kalungi.

Pada awalnya, di Oktober 2015, dua platform *smart home*

“*Utilities Management System membantunya untuk mengontrol tagihan listrik hingga bisa menghemat 10% - 15 % dari biaya yang biasa dibayarkan sebelumnya.*”

HBD tersebut diujicobakan hanya untuk 10 rumah di Yahua. Namun pada April 2016, sudah ribuan rumah tangga yang mempergunakannya. Bertambahnya pengguna rumah pintar ini menandakan bahwa manfaat platform teknologi HBD tersebut benar-benar dirasakan dan sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki para pemilik rumah saat ini.

Penghematan Biaya

Masyarakat yang menggunakan dua platform ini mengaku bahwa manfaat yang mereka peroleh sangat besar. Hal ini misalnya disampaikan oleh Sio Wei Hurng yang rumahnya termasuk dari 10 rumah yang menikmati dua fasilitas ini pertama



ILUSTRASI: IHOMEDECOR.CO

kali. Dia mencontohkan, *Utilities Management System* membantunya untuk mengontrol tagihan listrik hingga bisa menghemat 10% - 15 % dari biaya yang biasa dibayarkan sebelumnya.

Menurutnya, hal ini memberinya kesadaran tentang pentingnya mengubah gaya hidup selama di rumah, sehingga dapat menurunkan konsumsi energi. "Misalnya, jika Anda berpikir bahwa Anda menghabiskan terlalu banyak energi, Anda memeriksa dan Anda melihat bahwa itu sebenarnya AC kurang diperlukan. Apa yang kita lakukan adalah mematikannya di tengah malam dan kemudian menghidupkan kipas angin. Jadi, dengan cara itu kita menurunkan konsumsi energi," jelas Sio sebagaimana dilansir dari media Channel News Asia (23/4/2016).

Sejumlah perusahaan teknologi saat ini juga



Isu utama dari teknologi rumah pintar adalah penghematan hemat energi dan air, keamanan, serta kenyamanan saat di rumah.

berlomba-lomba untuk menciptakan aplikasi atau platform rumah pintar ini. Pada dasarnya, isu utama dari rumah pintar tersebut adalah penghematan energi dan air, keamanan, serta kenyamanan

saat dirumah. Semua pihak kemudian berlomba untuk menciptakan produk yang bisa memenuhi tiga isu utama tersebut.

Ada beberapa hal yang diperlukan untuk mewujudkan produk *smart home* tersebut. Selain adanya aplikasi, juga perlu perangkat pendukung lainnya yang terintegrasi dengan aplikasi yang sudah disediakan. Baik itu berupa sensor dan peralatan lainnya yang diinstal di rumah.

Mengingat permintaan rumah pintar semakin besar, berbagai pihak kemudian berlomba untuk menciptakan produk yang terbaik. Produk terbaik tersebut hanya bisa dihasilkan setelah terlebih dahulu melakukan penelitian dan inovasi tiada henti. Semua pihak kini sadar bahwa dunia terus berubah dan perubahan itu bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan.

■ SYIFA FAUZIAH

Para Duta Sanitasi Berkumpul di Ancol

Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali menggelar Jambore Sanitasi. Pada tahun ini, Jambore Sanitasi mengangkat bertema “Sanitasi Aman, Belajarku Nyaman”. Acara ini berlangsung meriah di Discovery Hotel & Convention Ancol Jakarta pada 3-9 Agustus 2016.

Peserta Jambore sanitasi adalah para duta sanitasi daerah. Mereka berhasil terpilih mewakili daerahnya setelah menjadi juara lomba poster dan karya tulis sanitasi tingkat SMP. Jambore tidak hanya diisi dengan kegiatan *workshop*, namun juga kunjungan lapangan ke unit pengolahan air limbah dan pengolahan sampah. “Para Duta Sanitasi harus menyebarkan informasi, pemahaman dan pengalaman tentang sanitasi kepada keluarga, teman-teman di sekolah dan kepada seluruh masyarakat yang dapat kalian jangkau,” pesan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, saat menghadiri acara tersebut.

Salah satu acara yang ditunggu-tunggu



FOTO: POKJA AMPL NASIONAL

dalam kegiatan ini adalah pemilihan duta sanitasi nasional. Ahmad Alfariyza dari Sulawesi Selatan terpilih sebagai Juara I ajang Duta Sanitasi Nasional. Juara II diraih Rahmalia Diani Saffana dari Kalimantan Barat dan Juara III Bernicha Alfritri dari Jawa Barat. Dewan juri pemilihan Duta Sanitasi Nasional terdiri dari perwakilan Kementerian PUPR; perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Kesehatan; Bappenas; serta sejumlah akademisi dari beberapa perguruan tinggi. ■ RINI HARUMI

Pak Nugroho Buka Kick-Off Nasional PPSP

Perwakilan AMPL tingkat provinsi hadir dalam acara *Kick-Off* Nasional Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2016 yang digelar pada 16-17 Februari 2016 di Jakarta. Acara ini dibuka oleh Direktur Permukiman dan Perumahan Kementerian PPN/Bappenas, Nugroho Tri Utomo.

Ini merupakan acara *Kick-Off* Nasional PPSP terakhir yang dihadiri Pak Nug, begitu dia biasa disapa. Dalam sambutannya, Nugroho mengatakan bahwa sekitar 465 daerah di Indonesia atau 89% dari keseluruhan telah mengikuti Program PPSP dan dari fakta progres dan kualitas dokumen perencanaan PPSP 2015 menunjukkan, masih terdapat kabupaten/kota yang belum menyelesaikan dokumen. Kualitas dokumen perencanaan juga masih rendah serta peran provinsi masih kurang dalam memantau progres dan kualitas.

“Penyelesaian kegiatan tepat waktu merupakan hal penting, tetapi kualitas kegiatan tersebut juga prioritas yang perlu diperhatikan.



FOTO: POKJA AMPL NASIONAL



Masih ada kegiatan yang memiliki nilai kualitas rendah,” ujar Pak Nug. ■ RINI HARUMI

Akkopsi Gelar Forum AHL

Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) menggelar *Advocacy and Horizontal Learning* (AHL) – STBM di Semarang pada 30 – 31 Mei 2016. Kegiatan AHL ini merupakan wadah advokasi sekaligus pembelajaran antar kepala daerah guna mengoptimalkan penyediaan layanan dasar, khususnya pada pembangunan sektor sanitasi.

Pertemuan yang secara khusus mengangkat tema ‘Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kunci keberhasilan *Universal Access* Sanitasi 2019’ ini dihadiri oleh Menteri Kesehatan Nila F Moeloek dan sejumlah gubernur dan para kepala daerah anggota Akkopsi. Kegiatan yang berlangsung dua hari ini juga diisi dengan kunjungan lapangan dan deklarasi *Open Defecation Free* (ODF) di Desa Pulokulon, Grobogan Jawa Tengah. Deklarasi ini merupakan salah satu wujud keberhasilan praktek implementasi pendekatan STBM di Kabupaten



FOTO: MEDIA INDONESIA

Grobogan, Jawa Tengah.

“Anak-anak mudah sakit diare, kekurangan gizi, daya tahan tubuh kurang akibat lingkungan yang tidak sehat. Generasi penerus yang lahir di tiap keluarga yang tidak memiliki akses sanitasi jauh tertinggal dibandingkan dengan anak-anak yang hidup di lingkungan yang sehat,” ujar Menkes saat memberikan sambutan. ■ RINI HARUMI

Peluncuran Aplikasi STBM Smart

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan akses sanitasi. Caranya adalah dengan membuat aplikasi STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) SMART. Aplikasi ini diluncurkan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek pada 30 Mei 2016 lalu di Ballroom Hotel Crowne Plaza Semarang.

STBM-SMART merupakan aplikasi yang dapat memonitor kelayakan akses sanitasi di tiap daerah di seluruh Indonesia. Aplikasi mampu memperlihatkan berapa persentase pencapaian akses sanitasi di suatu desa di 480 kabupaten dan 34 provinsi. STBM SMART diharapkan mampu mengawal program 100 persen akses sanitasi bagi masyarakat Indonesia pada 2019. Dalam mengembangkan aplikasi ini, Kemenkes mendapatkan dukungan dari lembaga *Water and Sanitation Program* (WSP) Bank Dunia. STBM-



ISTIMEWA

SMART terhubung langsung dengan database STBM nasional di www.stbm-indonesia.org.

Melalui aplikasi ini, pengguna tidak hanya bisa mengetahui pencapaian akses sanitasi di setiap desa, namun juga mengetahui para sanitarian yang bekerja di desa tersebut. Keberadaan aplikasi ini juga diharapkan bisa memacu kepala daerah diharap untuk meningkatkan akses sanitasi, keberhasilan mereka bisa langsung dimonitor masyarakat. Semakin besar akses sanitasi yang dicapai, maka kinerja mereka akan dinilai lebih berhasil. ■ RINI HARUMI

Surabaya jadi Tuan Rumah Prepcom 3 UN Habitat II

FOTO: VOA INDONESIA



Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menggelar konferensi untuk permukiman dan pembangunan berkelanjutan atau *The Third Session of the Preparatory Committee (Prepcom) for Habitat III* di Surabaya pada 25 – 27 Juli 2016. Surabaya terpilih menjadi tuan rumah karena dinilai memiliki perkembangan kota yang menonjol dan memiliki walikota yang berkomitmen.

Dalam acara itu hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimoeljono, serta sejumlah pejabat lainnya. Sementara itu peserta yang hadir lebih dari 3.500 partisipan dan delegasi, termasuk 1.886 perwakilan dari 193 negara anggota PBB yang hadir. Wakil Presiden menjadi wakil Pemerintah Indonesia yang membuka acara tersebut.

Menurut Sekretaris Jenderal Habitat III, Joan Clos, acara ini merupakan persiapan untuk konferensi Habitat III di Quito, Ekuador pada Oktober 2016. Semua delegasi berkomitmen untuk memberikan sumbangan pemikiran mengenai perencanaan perkotaan dan permukiman untuk konferensi Habitat III tersebut. Prepcom 3 akan menjadi kesempatan terakhir untuk semua negara anggota PBB untuk berinteraksi dan negosiasi demi tercapainya draf agenda perkotaan baru. ■ SYIFA FAIZIAH

Berbagai Cerita dalam Forum Inspirasi “Air Untuk Semua”

Para inspirator pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) menyampaikan pengalaman dan keberhasilan mereka dalam Forum Inspirasi “Air Untuk Semua” di Epicentrum Walk Jakarta pada Rabu 26 Oktober. Mereka adalah Arifin Rudiyanto (Deputi Menteri PPN/ Bappenas Bidang Pengembangan Regional), Oswar Mungkasa (Deputi Gubernur DKI Jakarta), Ellena Rachmawati (Ketua LSM YMP – NTB), Ni Putu Eka Wiryastuti (Bupati Tabanan Bali), Koesnanto (Direktur PD BPR BKK Purwodadi), dan Kholil (Ketua KSM Tirto Makmur Grobogan) Acara yang digelar oleh Jejaring AMPL dan disponsori Aqua Danone ini juga dihadiri oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro.

Menurut Leila Djafaar, Vice President General Secretary Danone Indonesia, dukungan Aqua pada acara ini adalah wujud komitmen perusahaan untuk ikut berpartisipasi dalam mewujudkan target akses universal 2019. Sejak tahun 2007, AQUA telah melakukan berbagai inisiatif untuk peningkatan akses air bersih



FOTO: ISLAHUDDIN

masyarakat di sekitar wilayah operasional dan di berbagai wilayah yang membutuhkan. “Kami juga melibatkan konsumen untuk ambil peranan dalam tujuan baik ini melalui program AQUA ‘Satu untuk Sepuluh’ pada tahun 2007, 2009, dan di akhir tahun 2016 kami luncurkan kembali,” ujar Leila.

Pelaksanaan program “Satu untuk Sepuluh” 2016 akan diterapkan dengan skema pembiayaan kredit mikro. Dia berharap dengan skema ini, program peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang dilakukan akan memiliki dampak yang lebih luas dan berkelanjutan. ■ SYIFA FAIZIAH

Keberhasilan PAMSIMAS Mendunia

MASYARAKAT perdesaan merasakan manfaat atas hadirnya program Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat). Semua lapisan masyarakat, baik itu kalangan miskin bisa meningkatkan akses air minum mereka. Manfaat ini juga disebabkan peran mereka yang ikut andil dalam pembangunan sejumlah infrastruktur, baik bantuan tenaga maupun materi.

Pamsimas menerapkan prinsip belajar dari pengalaman (*learning by doing*). Pada saat program ini diluncurkan banyak pelaku pembangunan, mulai dari fasilitator hingga kelompok pengelola air yang tidak mempunyai keahlian memadai untuk menjalankan program, namun kemudian mereka mampu belajar bersama. Hal ini juga yang membuat Pamsimas sukses

Dalam buku ini, Bank Dunia mengakui bahwa Pamsimas sukses meningkatkan akses air minum dan sanitasi. Mereka menyebut, sebelum



Judul : Pamsimas, Menjawab Tantangan Air Minum dan Sanitasi di Wilayah Perdesaan Indonesia

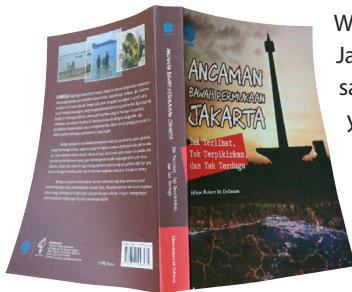
Penyusun : Tim R&W Publishing

Penerbit : Publikasi Bank Dunia, Jakarta 2015

Halaman : 108 hlm

Pamsimas, banyak program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas air minum dan sanitasi mengalami kegagalan hanya karena mengabaikan perilaku masyarakat yang kompleks. Studi evaluasi yang dipublikasikan pada tahun 2013 menunjukkan bahwa program ini telah memberikan akses air minum dan sanitasi layak kepada sekitar lima juta masyarakat Indonesia di lebih dari 7.000 desa. ■

Permukaan untuk Jakarta Makin Nyata



WARGA DKI Jakarta masih sangat banyak yang memenuhi kebutuhan air bersih mereka melalui penggunaan air tanah. Mereka

membuat sumur bor sendiri di rumah. Bahkan bangunan-bangunan komersial masih ada juga yang mempergunakan air tanah. Setiap hari ribuan kubik air tanah pun disedot secara massal. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan membahayakan kondisi permukaan tanah Jakarta. Permukaan tanah bisa turun dan berpengaruh pada bangunan-bangunan yang ada di atasnya. Ancaman ini nyata, karena penurunan permukaan tanah sudah terlihat sejak dekade 1980-an.

Judul : Ancaman Bawah Permukaan Jakarta: Tak Terlihat, Tak Terpikirkan, dan Tak Terduga

Penyusun : Robert M. Delinom (ed)

Penerbit : LIPI Press, Jakarta 2015

Halaman : 303 + x hlm

Dalam buku "Ancaman Bawah Permukaan Jakarta" para peneliti mewawancarai berbagai elemen penduduk Jakarta tentang perilaku mereka dalam mempergunakan air tanah. Para peneliti juga melihat jarak antara sumur bor dengan tangki septik yang mereka miliki. Dari wawancara itu diketahui tentang bagaimana cara mereka mengakses air minum dan infrastruktur sanitasi yang ada di permukiman. Rata-rata masyarakat menilai bahwa mengambil air tanah ada sebetulnya kewajiban.

Para peneliti juga memaparkan kondisi cekungan tanah Jakarta terkini, serta penurunan tanah selama beberapa tahun terakhir. Secara umum, buku ini memperlihatkan jelas bahwa jika penggunaan air tanah tidak segera diatasi akan berdampak lebih besar di masa mendatang.

Jejak Keberhasilan para Inspirator AMPL

Judul : Kita Bisa, Inspirasi Membangun Air Minum dan Sanitasi
Penyusun : Nurul Wajah Mujahid (dkk)
Penerbit : Pokja AMPL Nasional, Jakarta 2015
Halaman : 105 hlm

BANYAK inspirator pembangunan air minum dan sanitasi yang ada di negeri ini. Kiprah mereka telah memberikan hasil nyata bagi masyarakat sekitar. Semua inspirasi yang mereka berikan perlu disebarluaskan agar lahir inspirator-inspirator baru. Semakin banyak inspirator yang bekerja bersama masyarakat, maka makin cepat penyelesaian masalah, termasuk masalah akses air minum dan sanitasi, di Indonesia.

Buku 'Kita Bisa' ini merupakan buku kedua dari rangkaian buku

Policy Entrepreneur yang sengaja diterbitkan guna mengundang banyak orang untuk berkontribusi dan menjadi *champion*.

Para inspirator tersebut hadir dari berbagai lapisan masyarakat. Ada yang berasal dari tokoh agama, pemilik bank sampah, pengelola BPSPAMS, dosen bidang penyehatan masyarakat, hingga para kepala daerah dan pemangku kepentingan di tingkat pusat.

Solusi para inspirator yang diceritakan di buku ini mudah diaplikasikan, karena berbasis pengalaman di lapangan. Mereka berhasil mencari celah solusi di tengah permasalahan yang sebelumnya dianggap sulit teratasi. Seperti kebiasaan buang sampah dan air besar sembarangan, sulitnya menjangkau air bersih di daerah tandus, hingga mengakses pembiayaan pembangunan infrastruktur. Keberhasilan mereka menunjukkan bahwa kita bisa memberi solusi atas semua masalah yang ada. ■

Mentransfer Semangat Para Champion

Judul : Knowledge Day 2015, Mencipta Masa Depan Sanitasi dan Air Minum
Penyusun : Tim Pokja AMPL Nasional
Penerbit : Pokja AMPL Nasional, Jakarta 2015
Halaman : 55 hlm + 2 CD

INI bukan sekadar buku, tapi buku yang dilengkapi dengan dua CD (*compact disc*) yang menceritakan tentang keberhasilan pembangunan air minum dan sanitasi. Buku ini menceritakan alur terlaksananya kegiatan "*Knowlegde Day 2015*" yang berlangsung pada 10 November 2015. Mulai tahap persiapan, hingga pelaksanaannya.

Hal istimewa dari '*video book*' ini tentu adalah keberadaan 2 CD di dalamnya. Dua CD tersebut menampilkan video para *champion* di acara Knowledge Day 2015. Semangat mereka dalam

membangun akses air minum sanitasi tergambar dari mimik wajah dan suara yang lantang saat menyatakan keyakinan bahwa semua problem air minum dan sanitasi bisa diatasi.

Mereka tidak hanya berbicara, namun juga telah membuktikan.

Para pembaca layak untuk menonton tuntas 2 CD ini agar semangat mereka bisa juga mengalir kepada kita semua. ■



Keberhasilan mereka menunjukkan bahwa kita bisa memberi solusi atas semua masalah yang ada.



Sekarang, ada saja
orang-orang yang tidak
mau mengerti bahwa
kota besar Jakarta ini
harus mempunyai *physical
face* yang *waardig*
(wajah penampilan yang
berharga)

- amanah Soekarno kepada
Ali Sadikin (1964)

